

LAPORAN TAHUNAN
BARANG MILIK DAERAH
TAHUN 2021



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT**

3.1.1.2.26 Persediaan

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah Kabupaten Bangka Barat, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu paling lama atau maksimal 1 (satu) tahun. Dengan demikian, persediaan berupa :

- a. barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai dan barang bekas pakai.
- b. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Penilaian Persediaan

Saldo persediaan merupakan saldo hasil pemeriksaan persediaan (stock opname) per 31 Desember 2021 dan dinilai berdasarkan biaya perolehan persediaan yang terakhir.

Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Penatausahaan Persediaan

Rincian Persediaan

Persediaan untuk 31 Desember 2021 terdiri dari barang pakai habis, alat tulis kantor, barang cetakan, obat-obatan, alat kesehatan, bibit ikan dan barang berupa tanah, bangunan dan barang persediaan lainnya yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat.

Salah satu perolehan persediaan adalah pembelian yang bersumber dari dana APBD. Pembelian tersebut tidak serta merta diakui sebagai persediaan. Terdapat pembelian yang diakui sebagai belanja jasa dan/atau menjadi aset.

Belanja persediaan berdasarkan LRA merupakan belanja yang dicatat oleh PPK OPD berdasarkan laporan realisasi anggaran yang terdapat pada aplikasi SIMDA Keuangan, sedangkan belanja persediaan yang dicatat dalam laporan persediaan merupakan belanja persediaan berdasarkan laporan Pengurus Barang.

Perbandingan Belanja Persediaan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Persediaan yang disajikan dalam laporan persediaan Pengurus Barang adalah sebagai berikut :

No.	OPD	Belanja Persediaan berdasarkan LRA (Rp)	Belanja Persediaan yang dicatat dalam Laporan Persediaan (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	1.135.771.727,00	396.106.034,00	739.665.693,00
2	Dinas Kesehatan	12.992.170.989,00	13.198.112.149,16	(205.941.160,16)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	508.858.650,00	480.880.950,00	27.977.700,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	344.033.200,00	7.085.835.360,00	(6.741.802.160,00)
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	337.437.790,00	317.571.790,00	19.866.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	209.584.300,00	194.053.200,00	15.531.100,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	365.696.315,00	282.430.835,00	83.265.480,00
8	Dinas Pertanian dan Pangan	784.720.266,00	746.911.591,00	37.808.675,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	1.316.239.309,00	1.057.820.359,00	258.418.950,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	571.622.400,00	531.332.375,00	40.290.025,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	424.308.631,00	372.773.614,00	51.535.017,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	322.326.260,00	187.939.260,00	134.387.000,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	250.112.410,00	211.559.860,00	38.552.550,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	393.329.125,00	373.457.150,00	19.871.975,00
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	482.830.235,00	431.659.262,00	51.170.973,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	240.166.408,00	171.734.643,00	68.431.765,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	212.230.750,00	181.117.350,00	31.113.400,00
18	Sekretariat Daerah	1.951.171.475,00	1.895.914.975,00	55.256.500,00
19	Sekretariat DPRD	1.044.387.291,00	935.815.200,00	108.572.091,00
20	Kecamatan Muntok	763.618.156,00	609.023.210,00	154.594.946,00
21	Kecamatan Simpang Teritip	167.783.800,00	154.535.100,00	13.248.700,00
22	Kecamatan Jebus	208.911.300,00	200.713.750,00	8.197.550,00
23	Kecamatan Kelapa	265.700.860,00	229.982.350,00	35.718.510,00
24	Kecamatan Tempilang	146.977.246,00	147.432.646,00	(455.400,00)
25	Kecamatan Parittiga	166.963.650,00	149.683.200,00	17.280.450,00

No.	OPD	Belanja Persediaan berdasarkan LRA (Rp)	Belanja Persediaan yang dicatat dalam Laporan Persediaan (Rp)	Selisih (Rp)
26	Inspektorat Daerah	296.232.940,00	233.512.440,00	62.720.500,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	353.353.070,00	205.063.580,00	148.289.490,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	599.600.641,00	386.829.451,00	212.771.190,00
29	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	549.248.516,00	458.109.853,00	91.138.663,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	319.388.250,00	262.824.440,00	56.563.810,00
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	135.745.060,00	115.503.760,00	20.241.300,00
32	BLUD	5.466.971.536,62	4.555.933.158,37	911.038.378,25
Jumlah		33.327.492.556,62	36.762.172.895,53	(3.434.680.338,91)

Mutasi Belanja LRA ke Penerimaan Persediaan

Realisasi Anggaran Tahun 2021 (Rp)		33.327.492.556,62
Bertambah :		
- Hutang	195.010.798,95	
- Reklas dari beban pemeliharaan	8.049.200,00	
- Kelebihan pencatatan	1.000,00	
- Reklas dari Beban Hibah	6.777.974.760,00	
- Reklas dari Beban jasa	820.935.960,00	
- Pembulatan	136.944,16	
- Reklas dari Belanja Modal	98.108.621,00	
Jumlah bertambah (Rp)	7.900.217.284,11	
Berkurang :		
- Reklas ke Beban jasa	3.872.138.076,00	
- Koreksi harga	(5.000,00)	
- Reklas ke aset	163.793.000,00	
- Reklas ke pemeliharaan	23.221.500,00	
- Pembulatan	822.799,20	
- Hutang tahun sebelumnya	405.566.570,00	
Jumlah berkurang (Rp)	4.465.536.945,20	
Jumlah Penerimaan dari LRA (Rp)	36.762.172.895,53	

Dalam penyajian nilai persediaan di neraca, pembelian yang diakui sebagai belanja persediaan adalah belanja persediaan yang disajikan dalam laporan persediaan Pengurus Barang.

Rincian dan Mutasi Belanja Persediaan

Belanja Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp24.939.624.517,34 dan Rp61.927.316.763,93 dengan mutasi bertambah dan berkurang sebagai berikut :

Saldo Akhir per 31 Desember 2020 Audited (Rp)		61,927,316,763,93
Mutasi Bertambah		
1	Pembelian	36.726.172.895,53
2	Hibah	7.555.310.656,40
3	Dropping	18.495.921.922,62
Jumlah Mutasi Bertambah		62.813.405.474,55
Mutasi Berkurang		
1	Pemakaian	48.312.152.883,80
2	Hibah	3.555.094.774,50
3	Expired/Rusak	729.509.539,47
4	Reklas ke BMD	38.078.128.266,00
5	Dropping	11.237.470.793,63
6	Retur	753.000,00
Jumlah Mutasi Berkurang		101.913.109.257,41
Saldo Akhir per 31 Desember 2021 (Rp)		24.939.624.517,34

Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp24.939.624.517,34. Rincian persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 berdasarkan jenis persediaan adalah sebagai berikut :

Daftar Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jenis Persediaan	31 Desember 2021 Audited (Rp)	31 Desember 2020 Audited (Rp)
Bahan Habis Pakai dan Cetak	766.042.435,00	813.846.296,00
Obat dan Alat kesehatan	16.414.129.049,34	18.673.881.365,93
Bahan Percontohan	22.715.000,00	22.040.000,00
Cadangan Pangan/makanan/sembako	188.785.200,00	186.890.763,00
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	41.196.100,00	0,00
Hewan Ternak	3.750.000,00	0,00
Tanah	12.989.760,00	32.762.907.059,00

Jenis Persediaan	31 Desember 2021 Audited (Rp)	31 Desember 2020 Audited (Rp)
Barang Inventaris	7.490.016.973,00	8.171.246.280,00
Total	24.939.624.517,34	61.927.316.763,93

Rincian Persediaan dapat dilihat pada lampiran 7.1.

Persediaan dikelompokkan menjadi :

- a. Persediaan berupa *supplies* terdiri atas barang pakai habis, alat tulis kantor, barang cetakan berupa blanko KTP/KK, obat-obatan, alat kesehatan, bahan percontohan, dan barang yang dimaksudkan untuk dijual. Saldo persediaan berupa *supplies* tersebut berasal dari OPD termasuk BLUD. Saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp17.436.617.784,34 terdiri dari Persediaan pada Organisasi Perangkat Daerah sebesar Rp16.062.512.159,46 dan Persediaan pada BLUD sebesar Rp1.374.105.624,88. Rincian *supplies* per 31 Desember 2021 pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut :

No.	OPD	Nilai Persediaan Berupa <i>Supplies</i> (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	1.300.000,00
2.	Dinas Kesehatan	15.030.685.922,46
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.240.000,00
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	45.249.740,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.462.666,00
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	67.137.794,00
7.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	1.100.000,00
8.	Dinas Pertanian dan Pangan	258.154.755,00
9.	Dinas Lingkungan Hidup	1.642.900,00
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	380.678.079,00
11.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	129.355.053,00
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika	178.000,00
13.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	27.864.500,00
14.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	14.395.000,00
15.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.267.000,00
16.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.520.000,00
17.	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.399.000,00
18.	Sekretariat Daerah	1.868.000,00
19.	Sekretariat DPRD	2.407.020,00

No.	OPD	Nilai Persediaan Berupa <i>Supplies</i> (Rp)
20.	Kecamatan Muntok	11.416.800,00
21.	Kecamatan Simpang Teritip	170.000,00
22.	Kecamatan Jebus	150.000,00
23.	Kecamatan Kelapa	3.150.000,00
24.	Kecamatan Tempilang	1.388.000,00
25.	Kecamatan Parittiga	234.000,00
26.	Inspektorat Daerah	908.000,00
27.	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	132.000,00
28.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	4.385.000,00
29.	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	3.220.000,00
30.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6.703.500,00
31.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	160.000,00
32.	BLUD	1.374.105.624,88
33.	Sekolah	54.589.430,00
Total		17.436.617.784,34

- b. Persediaan berupa tanah, bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan barang inventaris lainnya yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak ketiga ataupun masyarakat sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar Rp7.503.006.733,00 yang terdapat pada 2 (dua) OPD dengan rincian sebagai berikut :

No	OPD Nama Persediaan	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.989.760,00
	1. Biaya Sertifikasi Tanah (Tahun 2019)	12.989.760,00
2.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	7.490.016.973,00
	1. Peningkatan SPAM Desa Pangek (Tahun 2021)	390.204.960,00
	2. Perluasan SPAM Desa Dendang (Tahun 2021)	160.745.000,00
	3. Peningkatan SPAM Desa Berang (Tahun 2021)	455.000.000,00
	4. Peningkatan SPAM Desa Simpang Tiga (Tahun 2021)	602.599.800,00
	5. Peningkatan SPAM Desa Air Menduyung (Tahun 2021)	455.000.000,00
	6. Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS 3R) (Tahun 2021)	600.000.000,00
	7. Pembangunan Tanki Septic Skala Individual Perdesaan (Tahun 2021)	491.920.000,00
	8. Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT (50 unit) Desa	447.200.000,00

No	OPD Nama Persediaan	Nilai (Rp)
	Peradong (Tahun 2021)	
9.	Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT (60 unit) Desa Berang (Tahun 2021)	536.640.000,00
10.	Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT (55 unit) Desa Air Menduyung (Tahun 2021)	491.920.000,00
11.	Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT (55 unit) Desa Belo Laut (Tahun 2021)	491.920.000,00
12.	Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT (50 unit) Desa Simpang Tiga (Tahun 2021)	447.200.000,00
13.	Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT (55 unit) Desa Tanjung Niur (Tahun 2021)	491.920.000,00
14.	Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT (60 unit) Desa Ibul (Tahun 2021)	536.640.000,00
15.	Hibah Pembangunan Sumur Bor Kejaksaan Negeri Muntok (Tahun 2021)	179.065.000,00
16.	Pembangunan fasilitas darat pelabuhan (Tahun 2020)	712.042.213,00
Total		7.503.006.733,00

Terdapat persediaan yang telah kadaluwarsa senilai Rp729.509.539,47 yang tidak disajikan sebagai persediaan yaitu :

No	OPD	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	Obat-Obatan	608.535.059,47
2.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan	Suntik KB	104.470.080,00
		Auto Disable	16.504.400,00
Total			729.509.539,47

Rincian Persediaan Kadaluwarsa dapat dilihat pada Lampiran 7.2

3.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap adalah Barang Milik Daerah berupa aset berwujud yang memiliki dan atau dikuasai Pemerintah Daerah yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, mempunyai nilai material dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang dapat diperoleh secara sah, termasuk aset tetap *idle* dan aset tetap kemitraan yang

direklasifikasikan ke aset lainnya dan berdasarkan peraturan Bupati Bangka Barat tentang Kebijakan Akutansi, aset tersebut mempunyai nilai yang dapat dikategorikan sebagai aset tetap.

Pengakuan Aset Tetap

Suatu aset tetap untuk dapat diakui sebagai aset tetap, maka aset tersebut harus berwujud dan memenuhi empat kriteria sebagai berikut :

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Penilaian Aset Tetap

Nilai aset tetap merupakan nilai aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sampai dengan 31 Desember 2021. Aset tetap dicatat senilai harga perolehannya, yaitu jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung misalnya biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal, biaya pemasangan, biaya profesional, biaya konstruksi dan biaya kepanitiaan.

Nilai Tercatat Aset Tetap

Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali untuk aset tetap yang tidak disusutkan seperti tanah, aset tetap lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Nilai tercatat tanah, aset tetap lainnya dan KDP adalah seluruh biaya perolehan aset tersebut hingga dapat dipergunakan.

Perolehan Aset bersumber dari dana APBD, droping atau Hibah. Untuk realisasi APBD tahun 2021 Kabupaten Bangka Barat sebesar Rp119.623.646.585,48 namun yang tercatat sebagai aset tetap yang diperoleh dari pengadaan sebesar Rp104.041.318.305,00. Selisih nilai tersebut berasal dari rekonsiliasi yang dilakukan antara PPK OPD dengan Pengurus Barang OPD, untuk memperoleh data yang akurat terkait pengakuan aset atas pengeluaran APBD.

Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi mutasi (bertambah/berkurang) pengeluaran APBD menjadi aset, diantaranya :

- a. Bertambah:
 - belanja pemeliharaan;
 - pembulatan bertambah pembagian harga perolehan secara proporsional;

- piutang;
 - reklas antar golongan; dan
 - reklas dari barang dan jasa (jika terdapat belanja barang dan jasa seperti belanja persediaan, honor, biaya perjalanan dinas, dan lain-lain yang menurut kriterianya memenuhi kriteria sebagai aset).
- b. Berkurang:
- belanja pemeliharaan;
 - reklas ke barang dan jasa;
 - pembulatan berkurang pembagian harga perolehan secara proporsional;
 - hutang;
 - reklas antar golongan; dan
 - hibah.
- c. Aset di Bawah Kapitalisasi adalah aset yang tidak masuk ke dalam neraca karena tidak memenuhi kriteria nilai perolehan minimum aset tetap.

Secara keseluruhan dapat diungkapkan bertambah dan berkurang aset tetap sebagai berikut :

Belanja Modal LRA Tahun 2021 (Rp)		119.623.646.585,48
Bertambah :		
- Belanja Pemeliharaan	1.377.705.550,00	
- Pembulatan	81,88	
- Piutang	0,00	
- Reklas Antar Golongan	3.466.757.821,00	
- Belanja Barang dan Jasa	2.618.712.904,00	
Jumlah bertambah (Rp)		7.463.176.356,88
Berkurang :		
- Belanja Pemeliharaan	858.176.803,00	
- Belanja Barang dan Jasa	147.451.621,00	
- Pembulatan	13,64	
- Hutang	15.648.724.490,72	
- Reklas Antar Golongan	3.466.757.821,00	
- Hibah	183.055.000,00	
Jumlah berkurang (Rp)		20.304.165.749,36
Aset di Bawah Kapitalisasi (Rp)		2.741.338.888,00
Realisasi belanja yang dicatat sebagai Aset Tetap Tahun 2021 (Rp)		104.041.318.305,00

Rincian Laporan Realisasi Anggaran yang diakui sebagai aset tetap per golongan adalah sebagai berikut:

Golongan Aset Tetap	LRA (Rp)	Mutasi Bertambah	Mutasi Berkurang	Aset di Bawah Kapitalisasi	Aset Tetap (Rp)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Tanah	5.498.170.870,00	292.781.155,00	0,00	0,00	5.790.952.025,00
Peralatan dan Mesin	28.321.836.534,18	2.109.082.920,82	454.959.105,00	727.544.612,00	29.248.415.738,00
Gedung dan Bangunan	29.153.043.926,36	3.599.739.811,00	16.460.874.535,36	152.226.176,00	16.139.683.026,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	53.165.752.404,94	622.612.203,06	1.964.275.359,00	0,00	51.824.089.249,00
Aset Tetap Lainnya	3.484.842.850,00	222.389.112,00	1.424.056.750,00	1.861.568.100,00	421.607.112,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	616.571.155,00	0,00	0,00	616.571.155,00
Total	119.623.646.585,48	7.463.176.356,88	20.304.165.749,36	2.741.338.888,00	104.041.318.305,00

Rincian Laporan Realisasi Anggaran tahun 2021 yang diakui sebagai aset tetap adalah sebagai berikut :

NO.	OPD	LRA (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Aset di bawah kapitalisasi (Rp)	Aset tetap (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4-5-6
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	20.095.105.472,38	1.760.829.638,00	2.178.739.520,38	2.446.670.549,00	17.230.525.041,00
2	Dinas Kesehatan	18.990.762.351,00	348.520.018,00	0,00	165.867.012,00	19.173.415.357,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	57.885.784.274,94	432.285.155,06	1.781.220.350,00	0,00	56.536.849.080,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	14.688.177.220,72	528.704.155,00	14.390.808.295,72	0,00	826.073.080,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	4.000.000,00	146.135.550,00	0,00	1.100.000,00	149.035.550,00
8	Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Lingkungan	0,00	255.000.000,00	0,00	0,00	255.000.000,00

NO.	OPD	LRA (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Aset di bawah kapitalisasi (Rp)	Aset tetap (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4-5-6
	Hidup					
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	230.004.950,00	12.966.450,00	9.976.451,00	1.207.762,00	231.787.187,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.023.295.600,00	391.685.991,00	391.686.000,00	11.685.250,00	1.011.610.341,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	473.423.500,00	0,00	0,00	165.000,00	473.258.500,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	64.180.000,00	0,00	0,00	0,00	64.180.000,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	28.570.000,00	39.225.000,00	0,00	250.000,00	67.545.000,00
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	13.572.770,00	0,00	10.572.740,00	0,00	3.000.030,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	182.500.000,00	3.160.000,00	0,00	0,00	185.660.000,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sekretariat DPRD	3.071.918.600,00	545.672.700,00	1.009.404.500,00	17.254.000,00	2.590.932.800,00
19	Sekretariat Daerah	895.226.500,00	2.568.750.917,00	301.659.161,00	61.283.992,00	3.101.034.264,00
20	Kecamatan Muntok	260.324.000,00	199.242.000,00	0,00	0,00	459.566.000,00
21	Kecamatan Simpang Teritip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Kecamatan Jebus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Kecamatan Kelapa	18.500.000,00	11.400.000,00	10.500.000,00	0,00	19.400.000,00
24	Kecamatan Tempilang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Parittiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO.	OPD	LRA (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Aset di bawah kapitalisasi (Rp)	Aset tetap (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4-5-6
26	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	99.923.000,00	0,00	0,00	0,00	99.923.000,00
31	Badan Kesatuan Bangsa Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	BLUD	1.598.378.346,44	219.598.782,82	219.598.731,26	35.855.323,00	1.562.523.075,00
	Total	119.623.646.585,48	7.463.176.356,88	20.304.165.749,36	2.741.338.888,00	104.041.318.305,00

Rincian dan Mutasi Aset Tetap

Nilai aset tetap yang disajikan sebagai aset tetap pada neraca per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.695.704.225.587,00 dan Rp2.593.983.600.185,00 dengan mutasi bertambah dan berkurang sebagai berikut :

Mutasi Bertambah dan Mutasi Berkurang Aset Tetap Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021

Golongan Aset Tetap	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Tanah	142.577.185.359,00	71.532.211.124,00	66.253.593.266,00	147.855.803.217,00
Peralatan dan Mesin	326.913.157.104,00	92.080.200.158,00	64.149.220.638,00	354.844.136.624,00
Gedung dan Bangunan	537.621.926.540,00	44.085.896.117,00	28.248.459.043,00	553.459.363.614,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.522.402.454.969,00	63.304.898.338,00	11.084.112.536,00	1.574.623.240.771,00
Aset Tetap Lainnya	13.529.446.754,00	483.889.443,00	636.615.450,00	13.376.720.747,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	50.939.429.459,00	616.571.155,00	11.040.000,00	51.544.960.614,00
Total Aset Tetap Bruto	2.593.983.600.185,00	272.103.666.335,00	170.383.040.933,00	2.695.704.225.587,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.389.299.179.875,00)	(115.469.647.674,00)	(7.207.083.079,00)	(1.497.561.744.470,00)

Golongan Aset Tetap	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Total Aset Tetap Netto	1.204.684.420.310,00	156.634.018.661,00	163.175.957.854,00	1.198.142.481.117,00

Penjelasan mutasi aset tetap adalah sebagai berikut :

Saldo Akhir per 31 Desember 2020 Audited (Rp)			2.593.983.600.185,00
Mutasi Bertambah			
1.	Pengadaan/Belanja Modal	104.041.318.305,00	
2.	Hibah	859.151.308,00	
3.	Mutasi Antar OPD	92.513.448.842,00	
4.	Koreksi Nilai	2.407.691.845,00	
5.	Reklas Dari Persediaan	38.078.128.266,00	
6.	Reklas	34.203.927.769,00	
7.	Selain Pengadaan	0,00	
	Jumlah Mutasi Bertambah (Rp)		272.103.666.335,00
Mutasi Berkurang			
1.	Penghapusan	2.378.010.726,00	
2.	Mutasi Antar OPD	92.541.232.933,00	
3.	Koreksi Nilai/Persediaan	2.385.032.345,00	
4.	Hibah	6.189.957,00	
5.	Reklas	73.072.574.972,00	
	Jumlah Mutasi Berkurang (Rp)		170.383.040.933,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2021 (Rp)			2.695.704.225.587,00

❖ Mutasi bertambah adalah penambahan atas aset tetap

- Pengadaan/Belanja Modal adalah hasil pengadaan atau realisasi anggaran tahun 2021 yang diakui sebagai aset tetap.
- Hibah adalah penerimaan atas barang yang bersumber dari hibah kementerian dan masyarakat.
- Mutasi antar OPD adalah penambahan aset tetap dari :
 - satu unit OPD ke Unit OPD lain dalam Kabupaten Bangka Barat;
 - Unit OPD ke sub unit OPD;
 - Pengelola ke Unit OPD.
- Koreksi Nilai adalah koreksi tambah atas nilai suatu aset berdasarkan dokumen atau koreksi atas suatu aset yang ternyata dikemudian hari diketahui bahwa barang milik daerah yang tercatat dalam Buku Inventaris tersebut nilainya berubah.
- Reklas dari persediaan adalah perpindahan belanja persediaan yang diakui sebagai aset tetap.

- Reklas adalah perpindahan dari satu golongan aset ke golongan aset yang lain. atau dari aset extra komptable ke aset intra komptable.
 - Kapitalisasi aset adalah penambahan nilai suatu aset akibat adanya kegiatan pemeliharaan atau renovasi atas satu aset yang sudah ada sebelumnya.
- ❖ Mutasi berkurang adalah pengurangan atas aset tetap
- Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Dalam hal Barang Milik Daerah yang sudah tidak berada dalam Penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah harus dilakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna. Nilai penghapusan pada Tahun 2021 adalah senilai Rp2.378.010.726.00 dengan rincian per OPD adalah sebagai berikut:

OPD	Penghapusan (Rp)					
	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jaringan, Jalan, dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Total
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	506.544.211,00	0,00	36.576.625,00	7.950.000,00	0,00	551.070.836,00
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	0,00	189.163.882,00	0,00	0,00	0,00	189.163.882,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	59.000.000,00	0,00	0,00	59.000.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Sekretariat Daerah						
Bagian Hukum	0,00	11.118.000,00	0,00	0,00	0,00	11.118.000,00
Bagian Kesejahteraan Rakyat	0,00	26.542.382,00	0,00	0,00	0,00	26.542.382,00
Bagian Organisasi	0,00	12.338.000,00	0,00	0,00	0,00	12.338.000,00
Bagian Umum dan Protokoler	0,00	932.762.220,00	0,00	0,00	2.452.500,00	935.214.720,00
Rumah Dinas Bupati	0,00	390.494.470,00	0,00	0,00	0,00	390.494.470,00
Rumah Dinas Wakil Bupati	0,00	193.068.436,00	0,00	0,00	0,00	193.068.436,00
Total	506.544.211,00	1.765.487.390,00	95.576.625,00	7.950.000,00	2.452.500,00	2.378.010.726,00

Rincian Penghapusan Aset Tetap dapat dilihat pada lampiran 8.

Penghapusan barang milik daerah dari daftar barang dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaannya, disebabkan antara lain karena pemusnahan dan pemindahtanganan, dapat rincian sebagai berikut :

OPD	Penghapusan (Rp)		
	Pemusnahan (Rp)	Pemindahtanganan (Rp)	Total (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	44.526.625,00	506.544.211,00	551.070.836,00
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	189.163.882,00	0,00	189.163.882,00
Dinas Lingkungan Hidup	59.000.000,00	0,00	59.000.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Sekretariat Daerah			
Bagian Hukum	11.118.000,00	0,00	11.118.000,00
Bagian Kesejahteraan Rakyat	26.542.382,00	0,00	26.542.382,00
Bagian Organisasi	12.338.000,00	0,00	12.338.000,00
Bagian Umum dan Protokoler	266.285.474,00	668.929.246,00	935.214.720,00
Rumah Dinas Bupati	390.494.470,00	0,00	390.494.470,00
Rumah Dinas Wakil Bupati	193.068.436,00	0,00	193.068.436,00
Total	1.202.537.269,00	1.175.473.457,00	2.378.010.726,00

a. Pemusnahan

Barang Milik Daerah yang sudah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak dapat dipindahtangankan serta terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan harus dilakukan pemusnahan. Pada tahun 2021 terdapat penghapusan aset tetap akibat pemusnahan senilai Rp1.202.537.269,00.

Secara keseluruhan, rincian penghapusan akibat pemusnahan berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah serta berdasarkan Golongan Aset Tetap adalah sebagai berikut:

OPD	Pemusnahan (Rp)			
	Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	Aset Tetap Lainnya (Rp)	Total (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	0,00	36.576.625,00	7.950.000,00	44.526.625,00
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	189.163.882,00	0,00	0,00	189.163.882,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	59.000.000,00	0,00	59.000.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Sekretariat Daerah				
Bagian Hukum	11.118.000,00	0,00	0,00	11.118.000,00

OPD	Pemusnahan (Rp)			
	Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	Aset Tetap Lainnya (Rp)	Total (Rp)
Bagian Kesejahteraan Rakyat	26.542.382,00	0,00	0,00	26.542.382,00
Bagian Organisasi	12.338.000,00	0,00	0,00	12.338.000,00
Bagian Umum dan Protokoler	263.832.974,00	0,00	2.452.500,00	266.285.474,00
Rumah Dinas Bupati	390.494.470,00	0,00	0,00	390.494.470,00
Rumah Dinas Wakil Bupati	193.068.436,00	0,00	0,00	193.068.436,00
Total	1.096.558.144,00	95.576.625,00	10.402.500,00	1.202.537.269,00

- Berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/504.A/4.4.1.1/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 terdapat penghapusan aset senilai Rp44.526.625,00 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang pelaksanaan pemusnahan fisiknya telah selesai dilaksanakan pada tahun 2020, namun penghapusan pada pencatatannya baru diakomodir pada tahun 2021.
- Selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/338/BPKAD/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/366/BPKAD/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/338/BPKAD/2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 terdapat penghapusan aset akibat pemusnahan senilai Rp1.158.010.644,00.

b. Pemindahtanganan atas barang milik daerah

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah. Bentuk pemindahtanganan Barang Milik Daerah meliputi penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah daerah.

OPD	Pemindahtanganan (Rp)				
	Tanah (Rp)	Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	Jaringan, Jalan, dan Irigasi (Rp)	Total (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	506.544.211,00	0,00	0,00	0,00	506.544.211,00
Sekretariat Daerah					
Bagian Umum dan Protokoler	0,00	668.929.246,00	0,00	0,00	668.929.246,00
Total	506.544.211,00	668.929.246,00	0,00	0,00	1.175.473.457,00

- Tanah yang dihapuskan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/390/1.20.13/2016 tanggal 25 Agustus 2016 tentang Penghapusan Barang-Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat yang Dihilangkan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2016, merupakan pengadaan gedung dan bangunan fasilitas penunjang lapangan bola senilai Rp506.544.211,00. Terdapat kesalahan pencatatan KIB pada aplikasi SIMDA BMD, pada SIMDA BMD dicatat pada KIB A yang merupakan Aset Tetap Tanah. Seharusnya berdasarkan dokumen pengadaan dicatat pada KIB C yang merupakan Aset Tetap Gedung dan Bangunan.
- Terdapat penjualan berupa kendaraan perorangan dinas yang sudah memenuhi syarat umur kendaraan dan syarat administrasi dapat dijual kepada Mantan Pejabat Negara dalam hal ini Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/313.A/BPKAD/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Penetapan Penjualan dan Harga Jual Kendaraan Perorangan Dinas Yang Dijual Kepada Mantan Pejabat Negara Dengan Cara Tanpa Lelang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021. Adapun kendaraan dinas dimaksud tercatat di dalam Buku Inventaris Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat dengan nilai Rp668.929.246,00.

No	Nomor SK Penjualan	Tanggal SK	Data Kendaraan	Nama/Jabatan Mantan Pejabat Negara	Nilai di BI (Rp)
1.	188.45/313.A/BPKA D/2021	13 Desember 2021	Toyota All New Fortuner 4x4 2.4 VRZ A/T	Markus.S.H. / Mantan Pejabat Negara Masa Jabatan 2016-2021	668.929.246,00
Jumlah					668.929.246,00

- Mutasi antar OPD adalah pengurangan aset tetap dari satu unit OPD ke Unit OPD lain dalam Kabupaten Bangka Barat.
 - satu unit OPD ke Unit OPD lain dalam Kabupaten Bangka Barat;

- Unit OPD ke sub unit OPD;
 - Unit OPD ke Pengelola.
- Koreksi Nilai/Persediaan adalah koreksi kurang atas nilai suatu aset berdasarkan dokumen atau koreksi atas suatu aset yang ternyata dikemudian hari diketahui bahwa barang milik daerah yang tercatat dalam Buku Inventaris tersebut bukan aset.
- Hibah adalah pengeluaran atas aset yang diserahkan kepada instansi vertikal, pemerintah desa atau masyarakat.

Pada Tahun 2021 terdapat aset yang dihibahkan ke instansi vertikal. dengan rincian :

No	Nomor Naskah Hibah	Tanggal Naskah Hibah	Jenis Aset	Penerima	Nilai (Rp)
1.	032/600/SETDA/2021	26/10/2021	Tanah bangunan Kantor Pemerintahan	Badan Narkotika Nasional	6.189.957,00
Jumlah					6.189.957,00

- Reklas adalah perpindahan dari satu golongan aset ke golongan aset yang lain, atau dari aset extra komtable ke aset intra komtable.

Mutasi Aset Tetap OPD per 31 Desember 2021

OPD	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	342.555.090.917,00	81.473.315.529,00	64.590.626.319,00	359.437.780.127,00
Dinas Kesehatan	194.711.166.259,00	37.800.459.998,00	18.496.681.735,00	214.014.944.522,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.523.857.716.917,00	94.028.153.656,00	36.431.434.644,00	1.581.454.435.929,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan	146.275.073.706,00	4.854.784.047,00	5.206.282.774,00	145.923.574.979,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.838.592.995,00	0,00	0,00	5.838.592.995,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	170.721.850,00	0,00	170.721.850,00
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.892.470.310,00	149.035.550,00	0,00	3.041.505.860,00
Dinas Pertanian dan Pangan	33.734.614.367,00	2.995.000,00	1.059.869.932,00	32.677.739.435,00
Dinas Lingkungan Hidup	30.480.945.759,00	255.000.000,00	59.000.000,00	30.676.945.759,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.910.857.711,00	231.787.187,00	10.000.000,00	4.132.644.898,00

OPD	31 Desember 2020 <i>(Audited)</i> (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.597.990.310,00	1.011.610.341,00	0,00	9.609.600.651,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	7.749.870.329,00	473.258.500,00	29.139.200,00	8.193.989.629,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	35.028.086.708,00	64.180.000,00	0,00	35.092.266.708,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	6.417.368.072,00	84.070.301,00	0,00	6.501.438.373,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	35.027.375.368,00	3.000.030,00	0,00	35.030.375.398,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16.779.542.728,00	586.079.000,00	89.111.065,00	17.276.510.663,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	9.632.144.863,00	170.721.850,00	0,00	9.802.866.713,00
Sekretariat Daerah	90.751.975.244,00	10.748.837.570,00	8.237.249.219,00	93.263.563.595,00
Sekretariat DPRD	18.996.429.804,00	3.112.074.264,00	1.644.855.216,00	20.463.648.852,00
Kecamatan Muntok	10.524.794.368,00	523.441.288,00	0,00	11.048.235.656,00
Kecamatan Simpang Teritip	5.338.872.334,00	0,00	0,00	5.338.872.334,00
Kecamatan Jebus	5.345.922.118,00	0,00	0,00	5.345.922.118,00
Kecamatan Kelapa	5.349.523.642,00	19.400.000,00	0,00	5.368.923.642,00
Kecamatan Tempilang	4.809.773.305,00	0,00	0,00	4.809.773.305,00
Kecamatan Parittiga	6.583.734.646,00	0,00	0,00	6.583.734.646,00
Inspektorat Daerah	2.530.941.192,00	0,00	0,00	2.530.941.192,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	6.248.704.079,00	0,00	0,00	6.248.704.079,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	6.721.310.576,00	0,00	74.188.230,00	6.647.122.346,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	5.853.187.343,00	137.000.000,00	0,00	5.990.187.343,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	12.438.630.865,00	594.795.000,00	0,00	13.033.425.865,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.910.805.461,00	0,00	360.450.300,00	1.550.355.161,00
BLUD	7.090.087.889,00	1.562.523.075,00	47.730.000,00	8.604.880.964,00
Pengelola	0,00	34.046.422.299,00	34.046.422.299	0,00
Total	2.593.983.600.185,00	272.103.666.335,00	170.383.040.933,00	2.695.704.225.587,00

Masa Manfaat Aset Tetap

Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang dapat digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Bangka Barat menetapkan masa manfaat untuk aset tetap per jenis dan per sub aset tetap. Penetapan masa manfaat tersebut menjadi salah satu dasar dalam penghitungan penyusutan aset tetap.

Perbedaan Pencatatan Perolehan Aset Tetap

Terkadang terdapat perbedaan pencatatan perolehan aset tetap yang terjadi antara unit keuangan dengan unit yang mengelola/mencatat asset, umumnya karena adanya pembulatan nilai pada biaya yang membentuk nilai perolehan aset tersebut. Untuk itu dilakukan rekonsiliasi nilai aset tetap antara Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD dengan Pejabat Pengurus Barang minimal per semester dalam rangka pencocokan nilai perolehan aset.

Kapitalisasi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap sehingga siap pakai, untuk meningkatkan kualitas, kapasitas/efisien/ dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Nilai Perolehan Minimum Aset tetap

Nilai perolehan minimum aset tetap yang menjadi penentu apakah suatu aset tetap masuk ke dalam neraca atau tidak berlaku untuk aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, aset tetap lainnya berupa buku, hewan/ternak dan tumbuhan. Sedangkan untuk aset tetap tanah, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya berupa barang bercorak kesenian dan konstruksi dalam pengerjaan tidak memiliki nilai perolehan minimum, sehingga seluruh aset tetap tersebut dalam kondisi baik akan disajikan dalam neraca.

Nilai perolehan minimum aset tetap yang ditetapkan sesuai Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut :

Daftar Nilai Perolehan Minimum Aset Tetap

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	0,00
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	500.000,00
2.2	Alat-alat Angkutan	500.000,00
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000,00

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
2.4	Alat-alat Pertanian/Perternakan	500.000,00
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000,00
2.6	Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	500.000,00
2.7	Alat-alat Kedokteran	500.000,00
2.8	Alat-alat Laboratorium	500.000,00
2.9	Alat-alat Keamanan	500.000,00
2.10	Komputer	500.000,00
2.11	Alat Ekplorasi	500.000,00
2.12	Alat Pengeboran	500.000,00
2.13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	500.000,00
2.14	Alat Bantu Eksplorasi	500.000,00
2.15	Alat Keselamatan Kerja	500.000,00
2.16	Alat Peraga	500.000,00
2.17	Peralatan Proses/Produksi	500.000,00
2.18	Rambu-Rambu	500.000,00
2.19	Peralatan Olahraga	500.000,00
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	10.000.000,00
3.2	Monumen	10.000.000,00
3.3	Bangunan Menara	10.000.000,00
3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	10.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	0,00
4.2	Bangunan Air/Irigasi	0,00
4.3	Instalasi	0,00
4.4	Jaringan	0,00
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Bahan Perpustakaan	100.000,00
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	0,00
5.3	Hewan	100.000,00
5.4	Biodata Perairan	0,00
5.5	Tanaman	100.000,00
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	0,00
5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00

Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran belanja modal yang nilainya melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan sesuai Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengatur bahwa perbaikan terhadap aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas mengubah masa manfaat aset tetap yang bersangkutan, dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan daerah serta tidak untuk dijual, maka pengeluaran belanja modal tersebut harus dikapitalisasi.

Perbaikan meliputi:

1. Renovasi
Renovasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak dan/atau penggantian bagian Aset Tetap dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas serta umur teknis.
2. Overhaul
Overhaul adalah kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, serta mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut :

1. Peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya minimum 10% dari harga perolehan;
2. Gedung dan bangunan yang nilainya minimum 25 % dari harga perolehan;
3. Jalan, irigasi, dan jaringan yang nilainya minimum 10% dari harga perolehan;
4. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut diatas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Batas minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk:

1. Pengadaan/pembelian tanah;
2. Pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak, dan tumbuhan.

Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa yang mengakibatkan adanya perolehan aset tetap hingga siap pakai, peningkatan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknis barang milik daerah dilakukan kapitalisasi.

Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri dari:

1. Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
2. Pengeluaran Belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi.
3. Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap akibat adanya perbaikan dilakukan dengan berpedoman pada tabel Masa Manfaat Aset Tetap akibat Perbaikan.

Pencatatan Ekstra Komptabel

Pencatatan Ekstra Komptabel adalah penatausahaan aset tetap untuk nilai aset tetap di bawah nilai minimal kapitalisasi atau aset tetap yang karena sifat, kondisi dan keberadaannya, tidak perlu dilaporkan dalam neraca.

Pencatatan Ekstra Komptabel dilakukan terhadap:

1. Aset tetap yang nilai perolehannya tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi;
2. Aset tak berwujud;
3. Aset yang secara permanen sudah dihentikan atau dilepas dari penggunaan aktif pemerintah karena rusak berat sehingga tidak bisa digunakan lagi secara normal dalam operasional dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang;
4. Aset yang dipinjamkaikan oleh instansi lain untuk jangka waktu tertentu;
5. Aset yang digunakan oleh instansi lain untuk tujuan akhir diserahkan; dan
6. Aset hilang/tidak diketahui keberadaannya.

Khusus untuk aset tak berwujud, dalam penatausahaan aset tetap dimasukkan ke dalam ekstra komptabel, namun di neraca disajikan sebagai aset tak berwujud dan dilakukan penghitungan amortisasinya.

3.1.3.1 Tanah

Aset tetap tanah merupakan tanah yang dikuasai dan dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Sedangkan tanah yang dikuasai namun dipergunakan oleh pihak lain diklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Penilaian Tanah

Aset tetap tanah dinilai berdasarkan harga perolehannya. Biaya perolehan tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan masih harus dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya pembebasan lahan, biaya *land clearing*, biaya terkait pengurusan atau perolehan hak atau sertifikat tanah, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap digunakan.

Nilai Tercatat Tanah

Aset tanah tidak dilakukan penyusutan, sehingga nilai tercatat (*carrying amount*) aset tanah adalah sama dengan nilai perolehan aset tetap tanah.

Nilai Batasan Kapitalisasi Tanah

Aset tetap tanah tidak memiliki nilai batasan minimal kapitalisasi, sehingga seluruh nilai aset tetap tanah disajikan dalam neraca.

Mutasi bertambah dan berkurang terhadap Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 yang diakui sebagai aset tetap untuk golongan tanah adalah sebagai berikut:

Realisasi Anggaran tahun 2021 (Rp)		5.498.170.870,00
Bertambah :		
- Belanja Pemeliharaan	0,00	
- Pembulatan	0,00	
- Piutang	0,00	
- Reklas Antar Golongan	0,00	
- Belanja Barang dan Jasa	292.781.155,00	
Jumlah bertambah (Rp)		292.781.155,00
Berkurang :		
- Belanja Pemeliharaan	0,00	
- Belanja Barang dan Jasa	0,00	
- Pembulatan	0,00	
- Hutang	0,00	
- Reklas Antar Golongan	0,00	
- Hibah	0,00	
Jumlah berkurang (Rp)		0,00
Aset di Bawah Kapitalisasi (Rp)		0,00
Realisasi belanja yang dicatat sebagai Aset Tetap Tanah Tahun 2021 (Rp)		5.790.952.025,00

Nilai aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp147.855.803.217,00 dan Rp142.577.185.359,00.

Mutasi bertambah nilai aset tetap tanah sebesar Rp71.532.211.124,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp66.253.593.266,00.

Penjelasan mutasi aset tetap tanah adalah sebagai berikut :

Saldo Akhir per 31 Desember 2020 Audited (Rp)		142.577.185.359,00
Mutasi Bertambah		
1.	Pengadaan/Belanja Modal	5.790.952.025,00
2.	Hibah	1,00
3.	Mutasi Antar OPD	32.991.341.799,00
4.	Koreksi Nilai	0,00
5.	Reklas Dari Persediaan	32.749.917.299,00
6.	Reklas	0,00
7.	Selain Pengadaan	0,00
	Jumlah Mutasi Bertambah	71.532.211.124,00

Mutasi Berkurang			
1.	Dihapus	506.544.211,00	
2.	Mutasi Antar OPD	32.990.941.799,00	
3.	Koreksi Nilai/Persediaan	0,00	
4.	Hibah	6.189.957,00	
5.	Reklas	32.749.917.299,00	
Jumlah Mutasi Berkurang			66.253.593.266,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2021 (Rp)			147.855.803.217,00

Secara lebih rinci, mutasi penambahan aset tetap tanah per OPD adalah sebagai berikut :

OPD	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	11.454.659.707,00	1,00	506.544.211,00	10.948.115.497,00
Dinas Kesehatan	861.910.853,00	0,00	0,00	861.910.853,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	112.793.917.227,00	38.280.545.324,00	32.749.917.299,00	118.324.545.252,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	4.987.108.561,00	0,00	0,00	4.987.108.561,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian dan Pangan	274.696.905,00	0,00	0,00	274.696.905,00
Dinas Lingkungan Hidup	200.919.280,00	0,00	0,00	200.919.280,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	2.178.250.354,00	0,00	0,00	2.178.250.354,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.519.020.100,00	0,00	0,00	1.519.020.100,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.056.291.180,00	0,00	0,00	2.056.291.180,00

OPD	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Dinas Kelautan dan Perikanan	108.270.000,00	0,00	0,00	108.270.000,00
Sekretariat Daerah	4.693.434.318,00	241.024.500,00	247.214.457,00	4.687.244.361,00
Sekretariat DPRD	240.775.000,00	0,00	0,00	240.775.000,00
Kecamatan Muntok	318.291.560,00	260.724.000,00	0,00	579.015.560,00
Kecamatan Simpang Teritip	9.239.550,00	0,00	0,00	9.239.550,00
Kecamatan Jebus	440.061.560,00	0,00	0,00	440.061.560,00
Kecamatan Kelapa	46.714.644,00	0,00	0,00	46.714.644,00
Kecamatan Tempilang	303.854.560,00	0,00	0,00	303.854.560,00
Kecamatan Parittiga	89.770.000,00	0,00	0,00	89.770.000,00
Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengelola	0,00	32.749.917.299,00	32.749.917.299,00	0,00
Total	142.577.185.359,00	71.532.211.124,00	66.253.593.266,00	147.855.803.217,00

Batas minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk pengadaan/pembelian tanah.

Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa yang mengakibatkan adanya perolehan aset tetap hingga siap pakai. Peningkatan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknis barang milik daerah dilakukan kapitalisasi.

Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri dari :

1. Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
2. Pengeluaran Belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi.
3. Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Pengakuan Tanah

1. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Terdapat tanah yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat namun belum ada bukti kepemilikan yang sah karena berbagai kondisi yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat belum dapat mengurus bukti kepemilikan atas tanah-tanah tersebut.

Daftar Tanah yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat namun belum ada bukti kepemilikan yang sah adalah sebagai berikut :

No.	OPD	Alamat/ Lokasi	Tahun Perolehan	Ukuran	Harga (Rp)	Pengguna	Keterangan
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga						
	Sekolah di Kec. Jebus	Dusun Kampak, Kec. Jebus	1981	7.000 M ²	35.000.000,00	SDN 16 JEBUS	Tanah tersebut berstatus Hutan Lindung
	Sekolah di Kec. Kelapa	Dusun Lagok, Desa Kacung				SDN 25 Kelapa	Merupakan tanah milik PT. Bumi Permai Lestari
		Dusun Suban, Desa Terentang				SDN 26 Kelapa	Merupakan tanah milik PT. Bumi Permai Lestari
	Sekolah di Kec. Parittiga	Desa Bakit	2021		1,00	SMPN 4 Parittiga	
2	Dinas Kesehatan						
	Puskesmas di Kec. Teritip	Desa Simpang Gong	2008	625 M ²	3.125.000	Polindes Sp. Gong	Merupakan Tanah Desa Simpang Gong
		Desa Air Nyatoh		195 M	248.000	Polindes Air Nyatoh	Tanah tersebut diakui oleh masyarakat setempat
	Puskesmas Kec. Jebus	Dusun Rukam	1985	187 M	219.000	Pustu Rukam	Tanah tersebut diakui oleh masyarakat setempat
		Desa Ketap	2008	385,80 M	1.929.000	Poskesdes Ketap	Merupakan tanah Desa
		Desa Sinar Manik	1982	450 M	2.250.000	Rumah Para Medis	Tanah tersebut diakui oleh masyarakat setempat
	Puskesmas di Kec. Parittiga	Dusun Penganak	2006	694,60 M	4.966.390	Pustu Air Gantang	Tanah tersebut berstatus Hutan Lindung
		Desa Cupat	1998	600 M	4.290.000	Polindes Cupat	Kawasan Pertambangan PT. Timah dan Hutan Produksi

No.	OPD	Alamat/ Lokasi	Tahun Perolehan	Ukuran	Harga (Rp)	Pengguna	Keterangan
		Desa Kapit	1988	375 M	1.875.000	Poskesdes Kapit	Merupakan tanah Desa
	Puskesmas di Kec. Tempilang	Desa Air Lintang	1978	162,40 M	812.000	Pustu Air Lintang	Merupakan tanah Desa
		Desa Buyan Kelumbi	1994	280,50 M	1.402.500	Poskesdes Buyan Kelumbi	Merupakan tanah Desa
		Desa Sangku	1996	300 M	1.500.000	Poskesdes Sangku	Merupakan tanah Desa
		Desa Sim pang Yul	2000	197 M	689.500	Polindes Sim pang Yul	Merupakan tanah Desa
		Desa Sinar Surya	2006	546 M	262.080	Polindes Sinar Surya	Merupakan tanah Desa
		Desa Tanjung Nyiur	2008	578 M	2.023.000	Poskesdes Tanjung Nyiur	Merupakan tanah Desa
		Dusun Buyan. Desa Buyan Kelumbi	2008	600 M	3.000.000	Poskesdes Buyan	Merupakan tanah Desa

2. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Daftar tanah milik Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang di atasnya dibangun oleh masyarakat tanpa persetujuan ataupun perjanjian hukum dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian BMD	Pemanfaatan	Perolehan	Subjek Pemakai Hasil Investigasi	Luas (m ²)	OPD/ Instansi	Harga Sewa yang Ditetapkan Tahun 2017 (Rp)	Lokasi	Keterangan
1.	Tanah Eks SDN 262	Sebagian Tanah untuk Bengkel dan Warung Kopi Kebun Nanas	P3D Bangka Induk Ke Bangka Barat Tahun 2003	Sdr.Muzakir	50	Pengelola	688.000,00	Jl. Hos Cokroaminoto RT/RW. 01/02 Kampung Air Terjun Kel. Sungai Daeng	- Telah dilakukan investigasi Kepemilikan - Telah dilakukan Pengamanan Berupa Papan Nama Kepemilikan
2.	Tanah GOR Muntok	Sebagian Tanah untuk Kantin GOR	Hibah PT Timah Tahun 1998	Sdr.Arlan	84.5	Pengelola	3.317.000,00	GOR Jl. Jend. Sudirman Kel. Sungai Daeng	- Telah dilakukan Pendekatan/Pe mberitahuan secara lisan tentang penjelasan kepada subjek hukum yang memanfaatkan

No	Uraian BMD	Pemanfaatan	Perolehan	Subjek Pemakai Hasil Investigasi	Luas (m ²)	OPD/ Instansi	Harga Sewa yang Ditetapkan Tahun 2017 (Rp)	Lokasi	Keterangan
3.	Tanah GOR Muntok	Sebagian Tanah untuk Billiard Center	Hibah PT Timah Tahun 1998	Sdr.Arlan	84,5	Pengelola	3.317.000,00	GOR Jl. Jend. Sudirman Kel. Sungai Daeng	BMD tanggal 15 November 2016 - Telah dilakukan Penilaian Sewa - Telah dilayangkan surat pemberitahuan 1, 2 dan terakhir Sewa BMD
									berisi himbawan mengajukan Pemanfaatan BMD Berupa Sewa
Total							7.322.000,00		

3. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sampai dengan Semester II Tahun 2020 tidak terdapat tanah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang sertifikat bukti kepemilikannya ganda.
4. Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran asset, hibah/donasi, dan lain-lain. Perolehan tanah melalui pembelian secara tunai diakui sebagai aset tetap-tanah, dan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan tanah melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan tanah melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai tanah pada neraca, dan sebagai pendapatan-LO, Perolehan tanah melalui pembelian kredit diakui sebagai aset tetap tanah, dan sebagai kewajiban pada neraca.
5. Tanah wakaf yang digunakan oleh instansi pemerintah tidak disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah karena Pemerintah tidak memiliki dan/atau tidak menguasai tanah wakaf tersebut. Sampai dengan 31 Desember 2021 tidak terdapat tanah wakaf yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Daftar Tanah yang sudah bersertifikat :

No	Nama OPD/Pengguna (pada sertifikat)	Luas (m ²)	No Sertifikat	Tahun	Ket
1	Gedung DPRD	15.282	153	2011	
2	DISHUBPARINFORM	2.659	154	2011	DINKOMINFO
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.547	155	2011	
4	DISPERINDAGKOP dan UKM	3.076	156	2011	DKUP
5	Dinas Pekerjaan Umum	11.174	157	2011	DPUPR
6	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	5.742	158	2011	BPKAD
7	DIKPORA	5.677	159	2011	
8	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	3.814	160	2011	DISPARBUD
9	Gedung Kantor Arsip dan Perpustakaan	3.285	161	2011	
10	Ruang Terbuka Hijau dan Lapangan Upacara	29.261	169	2013	
11	Ruang Terbuka Hijau	8.559	172	2013	
12	Kantor Pengelolaan Hutan Produksi	2.820	177	2014	
13	Gedung Metrologi	3.111	186	2018	
14	Gedung Uji Kelayakan Kendaraan	4.032	187	2018	
Total		101.039			

Sedangkan tanah yang ditempati OPD lain belum bersertifikat.

Catatan :

1. OPD belum mencatat tanah pada masing-masing buku inventaris karena belum ada penyerahan dari Sekretariat Daerah;
2. Tanah yang belum bersertifikat karena tanah masih berstatus Hutan Lindung (HL), dan sekarang masih dalam proses permohonan pengalihan status tanah dari HL menjadi APL ke Pemerintah Pusat.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2018 dan tahun 2019 telah melakukan pengukuran kembali tanah kompleks pemda tersebut yang dilakukan secara bertahap yaitu :

1. Tahap I pengukuran ulang dengan cara menggunakan drone dan tahap ini telah selesai dilakukan, sedangkan
2. Tahap II pengukuran ulang dengan cara memasang patok beton dan membuat titik GPS, masih dalam proses penyelesaian hingga terbitnya laporan keuangan ini.

Sehingga ukuran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pengukuran ulang belum dapat disajikan.

3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Aset tetap peralatan dan mesin dinilai berdasarkan harga perolehannya. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan masih harus dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Nilai Tercatat Peralatan dan Mesin

Nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap peralatan dan mesin adalah nilai buku aset tetap tersebut, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tersebut setelah dikurangi akumulasi penyusutannya.

Nilai Batasan Minimum Kapitalisasi Peralatan dan Mesin

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, nilai minimal kapitalisasi untuk aset peralatan dan mesin yaitu sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00.

Rincian dan Mutasi Peralatan dan Mesin

Mutasi bertambah dan berkurang terhadap Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 yang diakui sebagai aset tetap untuk golongan peralatan dan mesin adalah sebagai berikut :

Realisasi Anggaran tahun 2021 (Rp)		28.321.836.534,18
Bertambah :		
- Belanja Pemeliharaan	152.214.000,00	
- Pembulatan	76,82	
- Piutang	0,00	
- Reklas Antar Golongan	1.739.069.594,00	
- Belanja Barang dan Jasa	217.799.250,00	
Jumlah bertambah		2.109.082.920,82
Berkurang :		
- Belanja Pemeliharaan	7.780.740,00	
- Belanja Barang dan Jasa	147.451.621,00	
- Pembulatan	3,00	
- Hutang	0,00	
- Reklas Antar Golongan	299.726.741,00	
- Hibah	0,00	
Jumlah berkurang		454.959.105,00
Aset di Bawah Kapitalisasi		727.544.612,00
Realisasi belanja yang dicatat sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2021 (Rp)		29.248.415.738,00

Nilai aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp354.844.136.624,00 dan Rp326.913.157.104,00.

Mutasi bertambah nilai aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp92.080.200.158,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp64.149.220.638,00.

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Saldo Akhir Per 31 Desember 2020 (Rp)			326.913.157.104,00
Mutasi Bertambah (Rp)			
1.	Pengadaan/Belanja Modal	29.248.415.738,00	
2.	Hibah	859.151.307,00	
3.	Mutasi Antar OPD	29.350.800.984,00	
4.	Koreksi nilai/persediaan	21.679.500,00	
5.	Reklas Dari Persediaan	2.995.000,00	
6.	Reklas	32.597.157.629,00	
7.	Selain Pengadaan	0,00	
	Jumlah Mutasi Bertambah		92.080.200.158,00
Mutasi Berkurang (Rp)			
1.	Penghapusan	1.765.487.390,00	
2.	Mutasi Antar OPD	29.401.753.869,00	
3.	Koreksi Nilai/Persediaan	20.000,00	
4.	Hibah	0,00	
5.	Reklas	32.981.959.379,00	
	Jumlah Mutasi Berkurang		64.149.220.638,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2021 (Rp)			Rp354.844.136.624,00

Secara lebih rinci, mutasi penambahan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2021 per OPD adalah sebagai berikut :

OPD	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	84.343.167.920,00	51.406.191.953,00	42.155.287.805,00	93.594.072.068,00
Dinas Kesehatan	93.322.894.748,00	30.647.855.798,00	14.920.379.635,00	109.050.370.911,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.600.177.039,00	0,00	0,00	8.600.177.039,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	17.002.732.056,00	89.350.000,00	270.513.882,00	16.821.568.174,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan	5.028.329.195,00	0,00	0,00	5.028.329.195,00

OPD	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Pemadam Kebakaran				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	170.721.850,00	0,00	170.721.850,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	1.565.710.985,00	73.764.000,00	0,00	1.639.474.985,00
Dinas Pertanian dan Pangan	10.454.244.948,00	2.995.000,00	0,00	10.457.239.948,00
Dinas Lingkungan Hidup	12.263.239.558,00	132.500.000,00	0,00	12.395.739.558,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.270.053.511,00	231.787.187,00	10.000.000,00	2.491.840.698,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.032.392.509,00	548.070.359,00	0,00	5.580.462.868,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	3.603.834.872,00	473.258.500,00	29.139.200,00	4.047.954.172,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	3.351.792.919,00	64.180.000,00	0,00	3.415.972.919,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3.037.499.861,00	45.095.301,00	0,00	3.082.595.162,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.689.495.851,00	3.000.030,00	0,00	6.692.495.881,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.407.517.136,00	0,00	89.111.065,00	1.318.406.071,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	2.077.834.716,00	170.721.850,00	0,00	2.248.556.566,00
Sekretariat Daerah	24.721.016.814,00	6.416.699.213,00	4.609.605.305,00	26.528.110.722,00
Sekretariat DPRD	9.091.381.185,00	467.870.013,00	1.633.815.216,00	7.925.435.982,00
Kecamatan Muntok	1.722.750.949,00	3.400.000,00	0,00	1.726.150.949,00
Kecamatan Simpang Teritip	933.641.340,00	0,00	0,00	933.641.340,00
Kecamatan Jebus	1.923.994.562,00	0,00	0,00	1.923.994.562,00

OPD	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Kecamatan Kelapa	1.737.083.799,00	8.900.000,00	0,00	1.745.983.799,00
Kecamatan Tempilang	927.077.747,00	0,00	0,00	927.077.747,00
Kecamatan Parittiga	1.487.310.299,00	0,00	0,00	1.487.310.299,00
Inspektorat Daerah	1.588.026.442,00	0,00	0,00	1.588.026.442,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	3.185.514.259,00	0,00	0,00	3.185.514.259,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	3.523.312.852,00	0,00	23.188.230,00	3.500.124.622,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	4.436.771.570,00	86.000.000,00	0,00	4.522.771.570,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.592.289.773,00	181.273.000,00	0,00	4.773.562.773,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.210.862.801,00	0,00	360.450.300,00	850.412.501,00
BLUD	5.781.204.888,00	856.566.104,00	47.730.000,00	6.590.040.992,00
Total	326.913.157.104,00	92.080.200.158,00	64.149.220.638,00	354.844.136.624,00

Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa yang mengakibatkan adanya perolehan aset tetap hingga siap pakai, peningkatan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknis barang milik daerah dilakukan kapitalisasi.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap ditetapkan untuk peralatan dan mesin dan peralatan olahraga adalah yang nilainya minimum 10,00% dari harga perolehan.

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya.

Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri dari :

1. Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
2. Pengeluaran Belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi.
3. Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya.

Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa yang mengakibatkan adanya perolehan aset tetap hingga siap pakai, peningkatan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknis barang milik daerah dilakukan kapitalisasi.

Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri dari :

1. Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
2. Pengeluaran Belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi.
3. Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line*).

Berikut nilai aset tetap peralatan dan mesin per OPD :

**Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin OPD
Per 31 Desember 2021**

OPD	Nilai Bruto Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Nilai Buku Aset Tetap Peralatan dan Mesin
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	93.594.072.068,00	64.537.892.453,00	29.056.179.615,00
Dinas Kesehatan	109.050.370.911,00	78.989.558.228,00	30.060.812.683,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.600.177.039,00	7.607.328.665,00	992.848.374,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	16.821.568.174,00	7.679.877.910,00	9.141.690.264,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.028.329.195,00	4.107.590.929,00	920.738.266,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	170.721.850,00	170.721.850,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	1.639.474.985,00	1.537.156.296,00	102.318.689,00
Dinas Pertanian dan Pangan	10.457.239.948,00	8.563.953.062,00	1.893.286.886,00
Dinas Lingkungan Hidup	12.395.739.558,00	10.824.069.632,00	1.571.669.926,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.491.840.698,00	1.467.292.702,00	1.024.547.996,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.580.462.868,00	4.183.041.616,00	1.397.421.252,00

OPD	Nilai Bruto Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Nilai Buku Aset Tetap Peralatan dan Mesin
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Dinas Komunikasi dan Informatika	4.047.954.172,00	3.104.351.389,00	943.602.783,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	3.415.972.919,00	3.065.914.233,00	350.058.686,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3.082.595.162,00	2.861.717.863,00	220.877.299,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.692.495.881,00	6.046.389.271,00	646.106.610,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.318.406.071,00	1.205.018.288,00	113.387.783,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	2.248.556.566,00	2.160.338.790,00	88.217.776,00
Sekretariat Daerah	26.528.110.722,00	21.128.855.881,00	5.399.254.841,00
Sekretariat DPRD	7.925.435.982,00	6.562.475.510,00	1.362.960.472,00
Kecamatan Muntok	1.726.150.949,00	1.423.869.765,00	302.281.184,00
Kecamatan Simpang Teritip	933.641.340,00	902.403.008,00	31.238.332,00
Kecamatan Jebus	1.923.994.562,00	1.488.517.429,00	435.477.133,00
Kecamatan Kelapa	1.745.983.799,00	1.092.770.729,00	653.213.070,00
Kecamatan Tempilang	927.077.747,00	909.215.882,00	17.861.865,00
Kecamatan Parittiga	1.487.310.299,00	1.470.266.966,00	17.043.333,00
Inspektorat Daerah	1.588.026.442,00	1.569.217.972,00	18.808.470,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	3.185.514.259,00	3.012.899.004,00	172.615.255,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	3.500.124.622,00	3.280.753.454,00	219.371.168,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	4.522.771.570,00	4.214.747.017,00	308.024.553,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.773.562.773,00	4.181.117.560,00	592.445.213,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	850.412.501,00	843.962.501,00	6.450.000,00
BLUD	6.590.040.992,00	4.574.189.078,00	2.015.851.914,00
Total	354.844.136.624,00	264.767.474.933,00	90.076.661.691,00

3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Biaya Perolehan Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai gedung dan bangunan tersebut siap digunakan.

Nilai Tercatat Gedung dan Bangunan

Nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap gedung dan bangunan adalah nilai buku aset tetap tersebut, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tersebut setelah dikurangi akumulasi penyusutannya.

Nilai Batasan Minimum Kapitalisasi Gedung dan Bangunan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, nilai minimal kapitalisasi untuk gedung dan bangunan adalah sama dengan atau lebih Rp10.000.000,00.

Jika biaya perolehan per satuan gedung dan bangunan kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan, maka OPD mengakui/mencatat perolehan gedung dan bangunan sebagai beban operasional, dan oleh karena itu tidak disajikan di dalam neraca, namun diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Mutasi bertambah dan berkurang terhadap Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 yang diakui sebagai aset tetap untuk golongan Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut :

Realisasi Anggaran tahun 2021		29.153.043.926,36
Bertambah :		
- Belanja Pemeliharaan	1.053.029.409,00	
- Pembulatan	3,00	
- Piutang	0,00	
- Reklas Antar Golongan	759.353.900,00	
- Belanja Barang dan Jasa	1.787.356.499,00	
Jumlah bertambah		3.599.739.811,00
Berkurang :		
- Belanja Pemeliharaan	386.664.263,00	
- Belanja Barang dan Jasa	0,00	
- Pembulatan	1,64	
- Hutang	13.965.833.140,72	
- Reklas Antar Golongan	2.108.377.130,00	

	- Hibah	0,00	
	Jumlah berkurang		16.460.874.535,36
	Aset di Bawah Kapitalisasi		152.226.176,00
Realisasi belanja yang dicatat sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2021 (Rp)			16.139.683.026,00

Rincian dan Mutasi Gedung dan Bangunan

Nilai aset tetap berupa gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp553.459.363.614,00 dan Rp537.621.926.540,00.

Mutasi bertambah nilai aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp44.085.896.117,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp28.248.459.043,00.

Penjelasan mutasi aset tetap gedung dan bangunan adalah sebagai berikut :

Saldo Akhir per 31 Desember 2020 (Rp)			537.621.926.540,00
Mutasi Bertambah (Rp)			
1.	Pengadaan/Belanja Modal	16.139.683.026,00	
2.	Hibah	0,00	
3.	Mutasi Antar OPD	26.527.687.371,00	
4.	Koreksi Nilai/Persediaan	1.000.000,00	
5.	Reklas Dari Persediaan	0,00	
6.	Reklas	1.417.525.720,00	
7.	Selain Pengadaan	0,00	
	Jumlah Mutasi Bertambah		44.085.896.117,00
Mutasi Berkurang (Rp)			
1.	Penghapusan	95.576.625,00	
2.	Mutasi Antar OPD	26.770.915.081,00	
3.	Koreksi Nilai/Persediaan	0,00	
4.	Hibah	0,00	
5.	Reklas	1.381.967.337,00	
	Jumlah Mutasi Berkurang		28.248.459.043,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2021 (Rp)			553.459.363.614,00

Secara lebih rinci, mutasi penambahan aset tetap gedung dan bangunan per OPD adalah sebagai berikut :

OPD	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	233.582.090.076,00	28.969.910.220,00	20.978.478.059,00	241.573.522.237,00
Dinas Kesehatan	91.072.917.241,00	7.152.604.200,00	3.576.302.100,00	94.649.219.341,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.214.690.766,00	0,00	0,00	5.214.690.766,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	5.778.553.600,00	479.535.484,00	479.535.484,00	5.778.553.600,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	806.007.300,00	0,00	0,00	806.007.300,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	1.217.012.200,00	68.065.850,00	0,00	1.285.078.050,00
Dinas Pertanian dan Pangan	10.679.414.132,00	0,00	0,00	10.679.414.132,00
Dinas Lingkungan Hidup	6.887.883.646,00	122.500.000,00	59.000.000,00	6.951.383.646,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.545.224.200,00	0,00	0,00	1.545.224.200,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.736.233.741,00	395.156.000,00	0,00	3.131.389.741,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.534.594.600,00	0,00	0,00	1.534.594.600,00

OPD	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	28.223.063.331,00	0,00	0,00	28.223.063.331,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.316.187.086,00	38.975.000,00	0,00	2.355.162.086,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	19.096.367.357,00	0,00	0,00	19.096.367.357,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12.830.194.857,00	196.252.000,00	0,00	13.026.446.857,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	4.408.068.355,00	0,00	0,00	4.408.068.355,00
Sekretariat Daerah	59.208.032.930,00	3.624.377.300,00	3.104.143.400,00	59.728.266.830,00
Sekretariat DPRD	9.183.174.304,00	2.051.677.975,00	0,00	11.234.852.279,00
Kecamatan Muntok	6.233.319.859,00	259.317.288,00	0,00	6.492.637.147,00
Kecamatan Simpang Teritip	4.363.907.444,00	0,00	0,00	4.363.907.444,00
Kecamatan Jebus	2.811.165.996,00	0,00	0,00	2.811.165.996,00
Kecamatan Kelapa	2.911.401.667,00	0,00	0,00	2.911.401.667,00
Kecamatan Tempilang	3.520.707.548,00	0,00	0,00	3.520.707.548,00
Kecamatan Parittiga	4.779.747.847,00	0,00	0,00	4.779.747.847,00
Inspektorat Daerah	878.585.000,00	0,00	0,00	878.585.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	2.484.806.742,00	0,00	0,00	2.484.806.742,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	2.995.408.519,00	0,00	51.000.000,00	2.944.408.519,00

OPD	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.351.303.000,00	51.000.000,00	0,00	1.402.303.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	7.553.181.736,00	190.166.559,00	0,00	7.743.348.295,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	664.873.460,00	0,00	0,00	664.873.460,00
BLUD	753.808.000,00	486.358.241,00	0,00	1.240.166.241,00
Total	537.621.926.540,00	44.085.896.117,00	28.248.459.043,00	553.459.363.614,00

Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa yang mengakibatkan adanya perolehan aset tetap hingga siap pakai, peningkatan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknis barang milik daerah dilakukan kapitalisasi.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap ditetapkan untuk gedung dan bangunan yang nilainya minimum 25,00% dari harga perolehan.

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut diatas, diperlakukan sebagai biaya.

Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri dari :

1. Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
2. Pengeluaran Belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi.
3. Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Penyusutan aset tetap gedung dan bangunan dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line*).

Berikut nilai aset tetap gedung dan bangunan per OPD :

**Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan OPD
Per 31 Desember 2021**

OPD	Nilai Bruto Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Rp)	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (Rp)	Nilai Buku Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	241.573.522.237,00	63.829.796.572,00	177.743.725.665,00
Dinas Kesehatan	94.649.219.341,00	19.748.943.870,00	74.900.275.471,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.214.690.766,00	1.300.866.723,00	3.913.824.043,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	5.778.553.600,00	769.386.656,00	5.009.166.944,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	806.007.300,00	200.562.714,00	605.444.586,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	1.285.078.050,00	319.817.179,00	965.260.871,00
Dinas Pertanian dan Pangan	10.679.414.132,00	2.176.142.525,00	8.503.271.607,00
Dinas Lingkungan Hidup	6.951.383.646,00	1.463.452.034,00	5.487.931.612,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.545.224.200,00	371.120.404,00	1.174.103.796,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.131.389.741,00	580.275.727,00	2.551.114.014,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.534.594.600,00	306.584.629,00	1.228.009.971,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	28.223.063.331,00	6.354.663.072,00	21.868.400.259,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.355.162.086,00	515.446.257,00	1.839.715.829,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	19.096.367.357,00	3.202.342.997,00	15.894.024.360,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.026.446.857,00	684.858.642,00	12.341.588.215,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	4.408.068.355,00	1.190.888.800,00	3.217.179.555,00
Sekretariat Daerah	59.728.266.830,00	10.859.659.562,00	48.868.607.268,00
Sekretariat DPRD	11.234.852.279,00	2.412.962.152,00	8.821.890.127,00
Kecamatan Muntok	6.492.637.147,00	1.091.693.909,00	5.400.943.238,00
Kecamatan Simpang Teritip	4.363.907.444,00	639.972.397,00	3.723.935.047,00
Kecamatan Jebus	2.811.165.996,00	945.361.027,00	1.865.804.969,00

OPD	Nilai Bruto Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Rp)	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (Rp)	Nilai Buku Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Rp)
Kecamatan Kelapa	2.911.401.667,00	1.071.654.795,00	1.839.746.872,00
Kecamatan Tempilang	3.520.707.548,00	956.184.612,00	2.564.522.936,00
Kecamatan Parittiga	4.779.747.847,00	637.994.514,00	4.141.753.333,00
Inspektorat Daerah	878.585.000,00	219.558.665,00	659.026.335,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	2.484.806.742,00	568.943.613,00	1.915.863.129,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	2.944.408.519,00	632.068.028,00	2.312.340.491,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.402.303.000,00	337.291.767,00	1.065.011.233,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	7.743.348.295,00	2.070.561.681,00	5.672.786.614,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	664.873.460,00	168.275.853,00	496.597.607,00
BLUD	1.240.166.241,00	75.652.229,00	1.164.514.012,00
Total	553.459.363.614,00	125.702.983.605,00	427.756.380.009,00

3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya Perolehan Jalan Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap digunakan.

Nilai Batasan Minimum Kapitalisasi Jalan Irigasi dan Jaringan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, bahwa jalan, irigasi dan jaringan tidak memiliki nilai minimum kapitalisasi, sehingga seluruh jalan irigasi dan jaringan yang dalam kondisi baik dan digunakan dalam operasional disajikan di neraca.

Nilai Tercatat Jalan Irigasi dan Jaringan

Nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap jalan, irigasi dan jaringan adalah nilai buku aset tetap tersebut, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tersebut setelah dikurangi akumulasi penyusutannya.

Mutasi bertambah dan berkurang terhadap Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 yang diakui sebagai aset tetap untuk golongan Jalan Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut :

Realisasi Anggaran tahun 2021		53.165.752.404,94
Bertambah :		
- Belanja Pemeliharaan	172.462.141,00	
- Pembulatan	2,06	
- Piutang	0,00	
- Reklas Antar Golongan	405.815.060,00	
- Belanja Barang dan Jasa	44.335.000,00	
Jumlah bertambah		622.612.203,06
Berkurang :		
- Belanja Pemeliharaan	0,00	
- Belanja Barang dan Jasa	0,00	
- Pembulatan	9,00	
- Hutang	1.682.891.350,00	
- Reklas Antar Golongan	98.329.000,00	
- Hibah	183.055.000,00	
Jumlah berkurang		1.964.275.359,00
Aset di Bawah Kapitalisasi		0,00
Realisasi belanja yang dicatat sebagai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021 (Rp)		51.824.089.249,00

Rincian dan Mutasi Jalan Irigasi dan Jaringan

Nilai aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp1.574.623.240.771,00 dan Rp1.522.402.454.969,00.

Mutasi bertambah nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp63.304.898.338,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp11.084.112.536,00.

Penjelasan mutasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan adalah sebagai berikut :

Saldo Akhir per 31 Desember 2020 (Rp)		1.522.402.454.969,00
Mutasi Bertambah (Rp)		
1.	Pengadaan/Belanja Modal	51.824.089.249,00
2.	Hibah	0,00
3.	Mutasi Antar OPD	3.582.921.660,00
4.	Koreksi Nilai/Persediaan	2.385.012.345,00

5.	Reklas Dari Persediaan	5.325.215.967,00	
6.	Reklas	187.659.117,00	
7.	Selain Pengadaan	0,00	
	Jumlah Mutasi Bertambah		63.304.898.338,00
Mutasi Berkurang (Rp)			
1.	Dihapus	7.950.000,00	
2.	Mutasi Antar OPD	3.365.934.224,00	
3.	Koreksi Nilai/Persediaan	2.385.012.345,00	
4.	Hibah	0,00	
5.	Reklas	5.325.215.967,00	
	Jumlah Mutasi Berkurang		11.084.112.536,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2021 (Rp)			1.574.623.240.771,00

Secara lebih rinci, mutasi penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per OPD adalah sebagai berikut :

OPD	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan. dan Olahraga	2.601.524.943,00	847.045.024,00	321.878.794,00	3.126.691.173,00
Dinas Kesehatan	9.255.643.017,00	0,00	0,00	9.255.643.017,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.396.472.748.085,00	55.649.279.332,00	3.681.517.345,00	1.448.440.510.072,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	68.964.906.330,00	4.043.978.408,00	4.456.233.408,00	68.552.651.330,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	76.173.500,00	7.205.700,00	0,00	83.379.200,00
Dinas Pertanian dan Pangan	12.006.869.529,00	0,00	1.059.869.932,00	10.946.999.597,00

OPD	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Dinas Lingkungan Hidup	11.127.386.075,00	0,00	0,00	11.127.386.075,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95.580.000,00	0,00	0,00	95.580.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	514.052.040,00	68.383.982,00	0,00	582.436.022,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.609.898.857,00	0,00	0,00	2.609.898.857,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	1.257.076.364,00	0,00	0,00	1.257.076.364,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	567.633.025,00	0,00	0,00	567.633.025,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7.272.158.428,00	0,00	0,00	7.272.158.428,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	187.071.686,00	389.827.000,00	0,00	576.898.686,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	2.824.718.900,00	0,00	0,00	2.824.718.900,00
Sekretariat Daerah	2.036.604.414,00	455.285.557,00	268.108.057,00	2.223.781.914,00
Sekretariat DPRD	434.156.815,00	311.834.526,00	0,00	745.991.341,00
Kecamatan Muntok	1.995.613.000,00	0,00	0,00	1.995.613.000,00
Kecamatan Simpang Teritip	28.500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00
Kecamatan Jebus	170.700.000,00	0,00	0,00	170.700.000,00
Kecamatan Kelapa	653.583.532,00	10.500.000,00	0,00	664.083.532,00
Kecamatan Tempilang	42.335.000,00	0,00	0,00	42.335.000,00
Kecamatan Parittiga	221.008.000,00	0,00	0,00	221.008.000,00
Inspektorat Daerah	54.540.250,00	0,00	0,00	54.540.250,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	174.391.000,00	0,00	0,00	174.391.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	190.283.800,00	0,00	0,00	190.283.800,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	58.995.673,00	0,00	0,00	58.995.673,00

OPD	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	280.303.506,00	223.355.441,00	0,00	503.658.947,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35.069.200,00	0,00	0,00	35.069.200,00
BLUD	192.930.000,00	1.698.368,00	0,00	194.628.368,00
Pengelola	0,00	1.296.505.000,00	1.296.505.000,00	0,00
Total	1.522.402.454.969,00	63.304.898.338,00	11.084.112.536,00	1.574.623.240.771,00

Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa yang mengakibatkan adanya perolehan aset tetap hingga siap pakai, peningkatan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknis barang milik daerah dilakukan kapitalisasi.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap ditetapkan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang nilainya minimum 10,00% dari harga perolehan.

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut diatas, diperlakukan sebagai biaya.

Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri dari:

1. Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
2. Pengeluaran Belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi.
3. Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Penyusutan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line*).

Berikut nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per OPD :

**Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan OPD
Per 31 Desember 2021**

OPD	Nilai Bruto Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Nilai Bersih Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	3.126.691.173,00	929.637.353,00	2.197.053.820,00
Dinas Kesehatan	9.255.643.017,00	2.583.816.835,00	6.671.826.182,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.448.440.510.072,00	1.061.891.470.389,00	386.549.039.683,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	68.552.651.330,00	21.557.995.775,00	46.994.655.555,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	83.379.200,00	25.216.287,00	58.162.913,00
Dinas Pertanian dan Pangan	10.946.999.597,00	6.749.597.249,00	4.197.402.348,00
Dinas Lingkungan Hidup	11.127.386.075,00	7.754.639.993,00	3.372.746.082,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95.580.000,00	24.031.881,00	71.548.119,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	582.436.022,00	110.448.012,00	471.988.010,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.609.898.857,00	1.140.567.079,00	1.469.331.778,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	1.257.076.364,00	351.983.147,00	905.093.217,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	567.633.025,00	145.590.912,00	422.042.113,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7.272.158.428,00	1.132.589.557,00	6.139.568.871,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	576.898.686,00	60.032.591,00	516.866.095,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	2.824.718.900,00	560.046.108,00	2.264.672.792,00

OPD	Nilai Bruto Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Nilai Bersih Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)
Sekretariat Daerah	2.223.781.914,00	824.581.891,00	1.399.200.023,00
Sekretariat DPRD	745.991.341,00	165.352.864,00	580.638.477,00
Kecamatan Muntok	1.995.613.000,00	537.145.096,00	1.458.467.904,00
Kecamatan Simpang Teritip	28.500.000,00	6.662.500,00	21.837.500,00
Kecamatan Jebus	170.700.000,00	20.686.741,00	150.013.259,00
Kecamatan Kelapa	664.083.532,00	96.986.969,00	567.096.563,00
Kecamatan Tempilang	42.335.000,00	17.942.011,00	24.392.989,00
Kecamatan Parittiga	221.008.000,00	132.178.358,00	88.829.642,00
Inspektorat Daerah	54.540.250,00	17.745.962,00	36.794.288,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	174.391.000,00	65.980.561,00	108.410.439,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	190.283.800,00	55.128.683,00	135.155.117,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	58.995.673,00	31.230.247,00	27.765.426,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	503.658.947,00	74.068.608,00	429.590.339,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35.069.200,00	9.471.978,00	25.597.222,00
BLUD	194.628.368,00	18.460.295,00	176.168.073,00
Total	1.574.623.240.771,00	1.107.091.285.932,00	467.531.954.839,00

3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset Tetap Lainnya terdiri dari buku-buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, biota perairan, tanaman, barang koleksi non budaya, aset tetap dalam renovasi.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap dipakai.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

Nilai Batasan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya yang memiliki nilai minimum kapitalisasi adalah buku dan hewan/ternak dan tumbuhan, yaitu:

- Nilai batasan minimum kapitalisasi buku perpustakaan adalah Rp100.000,00;
- Nilai batasan minimum kapitalisasi barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga adalah Rp0,00;
- Nilai batasan minimum kapitalisasi hewan, ternak, tumbuhan pohon dan tumbuhan tanaman hias adalah Rp100.000,00.

Sehingga aset tetap lainnya berupa buku dan hewan/ternak dan tumbuhan yang melampaui nilai batasan minimum kapitalisasi dan dalam kondisi baik, akan disajikan dan dilaporkan di neraca. Sebaliknya, jika tidak melampaui nilai batasan minimal kapitalisasi ataupun dalam kondisi rusak berat, maka aset tetap tersebut tidak disajikan dalam neraca.

Sedangkan untuk aset tetap lainnya berupa alat kesenian/barang bercorak kesenian karena tidak memiliki nilai batasan minimal kapitalisasi, maka seluruh aset tetap tersebut jika dalam kondisi baik akan disajikan seluruhnya di neraca.

Nilai Tercatat aset tetap lainnya

Nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap lainnya adalah nilai buku aset tetap tersebut. yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tersebut.

Aset Tetap Lainnya berupa buku perpustakaan. hewan dan tanaman tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Mutasi bertambah dan berkurang terhadap Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran yang diakui sebagai aset tetap untuk golongan Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut :

Realisasi Anggaran tahun 2021		3.484.842.850,00
Bertambah :		
- Belanja Pemeliharaan	0,00	
- Pembulatan	0,00	
- Piutang	0,00	
- Reklas Antar Golongan	222.270.112,00	
- Belanja Barang dan Jasa	119.000,00	

	Jumlah bertambah		222.389.112,00
Berkurang :			
	- Belanja Pemeliharaan	463.731.800,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	
	- Pembulatan	0,00	
	- Hutang	0,00	
	- Reklas Antar Golongan	960.324.950,00	
	- Hibah	0,00	
	Jumlah berkurang		1.424.056.750,00
	Aset di Bawah Kapitalisasi		1.861.568.100,00
Realisasi belanja yang dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 (Rp)			421.607.112,00

Rincian dan Mutasi aset tetap lainnya

Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp13.376.720.747,00 dan Rp13.529.446.754,00.

Mutasi bertambah nilai aset tetap lainnya sebesar Rp483.889.443,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp636.615.450,00.

Penjelasan mutasi aset tetap lainnya adalah sebagai berikut :

Saldo Akhir per 31 Desember 2020 (Rp)			13.529.446.754,00
Mutasi Bertambah (Rp)			
1.	Pengadaan/Belanja Modal	421.607.112,00	
2.	Hibah	0,00	
3.	Mutasi Antar OPD	60.697.028,00	
4.	Koreksi Nilai/Persediaan	0,00	
5.	Reklas Dari Persediaan	0,00	
6.	Reklas	1.585.303,00	
7.	Selain Pengadaan	0,00	
	Jumlah Mutasi Bertambah		483.889.443,00
Mutasi Berkurang (Rp)			
1.	Penghapusan	2.452.500,00	
2.	Mutasi Antar OPD	11.687.960,00	
3.	Koreksi Nilai/Persediaan	0,00	
4.	Hibah	0,00	
5.	Reklas	622.474.990,00	

	Jumlah Mutasi Berkurang		636.615.450,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2021 (Rp)		13.376.720.747,00

Rincian Aset Tetap Lainnya per rincian objek adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya	Nilai (Rp)
Bahan Perpustakaan	10.322.722.286,00
Barang Bercorak Kebudayaan/Kesenian	2.002.912.318,00
Hewan	246.000.000,00
Biota Perairan	32.799.992,00
Tanaman	0,00
Barang Koleksi Non Budaya	0,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	772.286.151,00
Total	13.376.720.747,00

Secara lebih rinci, mutasi penambahan aset tetap lainnya per OPD dengan rincian sebagai berikut :

OPD	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	10.573.648.271,00	250.168.331,00	628.437.450,00	10.195.379.152,00
Dinas Kesehatan	3.842.400,00	0,00	0,00	3.842.400,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	322.346.500,00	0,00	0,00	322.346.500,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.256.500,00	0,00	0,00	4.256.500,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	33.573.625,00	0,00	0,00	33.573.625,00
Dinas Pertanian dan Pangan	319.388.853,00	0,00	0,00	319.388.853,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.517.200,00	0,00	0,00	1.517.200,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00

OPD	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	315.312.020,00	0,00	0,00	315.312.020,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.542.000,00	0,00	0,00	1.542.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	17.903.740,00	0,00	0,00	17.903.740,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	218.500.000,00	00,0	0,00	218.500.000,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	274.383.632,00	0,00	0,00	274.383.632,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	298.467.869,00	0,00	0,00	298.467.869,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	35.244.992,00	0,00	0,00	35.244.992,00
Sekretariat Daerah	92.886.768,00	11.451.000,00	8.178.000,00	96.159.768,00
Sekretariat DPRD	6.242.500,00	4.369.750,00	0,00	10.612.250,00
Kecamatan Muntok	254.819.000,00	0,00	0,00	254.819.000,00
Kecamatan Simpang Teritip	3.584.000,00	0,00	0,00	3.584.000,00
Kecamatan Jebus	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kelapa	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
Kecamatan Tempilang	15.798.450,00	0,00	0,00	15.798.450,00
Kecamatan Parittiga	5.898.500,00	0,00	0,00	5.898.500,00
Inspektorat Daerah	9.789.500,00	0,00	0,00	9.789.500,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	403.992.078,00	0,00	0,00	403.992.078,00

OPD	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	12.305.405,00	0,00	0,00	12.305.405,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	6.117.100,00	0,00	0,00	6.117.100,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	12.855.850,00	0,00	0,00	12.855.850,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
BLUD	284.490.001,00	217.900.362,00	0,00	502.390.363,00
Total	13.529.446.754,00	483.889.443,00	636.615.450,00	13.376.720.747,00

Batas minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak, dan tumbuhan.

Aset tetap lainnya yang dikapitalisasi dibukukan dan dilaporkan di dalam Neraca. Aset tetap lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak disajikan dalam Neraca, namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. KDP mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran atau belum mencapai 100,00% pengerjaannya (belum selesai/dilanjutkan tahun berikutnya).

Pengakuan KDP

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai KDP jika :

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Penilaian KDP

Nilai KDP menggambarkan jumlah akumulasi biaya yang telah dikeluarkan melalui belanja modal untuk memperoleh aset tetap tersebut sampai akhir tahun pelaporan. Biaya tersebut merupakan biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi :

1. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
2. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
3. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
4. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Dan biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan konstruksi tertentu, antara lain :

1. Asuransi;
2. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
3. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya tersebut dialokasikan dengan metode yang sistematis, rasional dan konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama.

Nilai Tercatat KDP

Karena aset tetap KDP tidak dihitung penyusutannya, maka nilai tercatat untuk aset tetap KDP adalah sama dengan nilai perolehan aset tetap tersebut, yaitu jumlah akumulasi biaya yang telah dikeluarkan melalui belanja modal untuk memperoleh aset tetap tersebut sampai akhir tahun pelaporan.

Mutasi bertambah dan berkurang terhadap Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 yang diakui sebagai aset tetap untuk golongan Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

Realisasi Anggaran tahun 2021 (Rp)		0,00
Bertambah :		
- Belanja Pemeliharaan	0,00	
- Pembulatan	0,00	
- Piutang	0,00	
- Reklas Antar Golongan	340.249.155,00	
- Belanja Barang dan Jasa	276.322.000,00	
Jumlah bertambah (Rp)		616.571.155,00
Berkurang :		
- Belanja Pemeliharaan	0,00	
- Belanja Barang dan Jasa	0,00	
- Pembulatan	0,00	
- Hutang	0,00	
- Reklas Antar Golongan	0,00	

- Hibah	0,00	
Jumlah berkurang (Rp)		0,00
Aset di Bawah Kapitalisasi (Rp)		0,00
Realisasi belanja yang dicatat sebagai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2021 (Rp)		616.571.155,00

**Daftar Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan
Per 31 Desember 2021**

Uraian	Tahun	Jumlah (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		874.512.800,00
DED Kolong Retensi Menumbing	2012	437.032.000,00
SID Jaringan Irigasi Pangkal Beras	2015	48.865.000,00
SID Jaringan Irigasi Bukit Terak	2015	48.597.000,00
SID Potensi Banjir Kecamatan Muntok	2015	72.480.000,00
Jaringan irigasi Buyan – Kelumbi Kec. Tempilang	2014	126.969.800,00
Jalan TPA Air Belo Muntok	2014	16.850.000,00
Jalan Pebuar-Pangkal Balok	2015	12.470.000,00
Jalan Pantai Desa Air Nyatoh	2015	12.920.000,00
DED Jalan	2021	98.329.000,00
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan		49.461.346.814,00
DED Gedung Serba Guna Kec. Muntok	2012	140.130.000,00
DED Penambahan Pasar Baru Muntok	2012	94.487.000,00
RP4D	2012	333.142.000,00
DED Sport Center	2012	463.812.500,00
DED Gedung PKK	2013	45.787.000,00
DED Rumah Dinas Bupati	2014	118.790.000,00
DED Rumah Dinas DPRD	2014	118.200.000,00
DED Ruang Terbuka Hijau	2014	93.527.000,00
DED Kota Pusaka Muntok	2014	361.300.000,00
DED Pembangunan Terminal B	2013	311.633.800,00
Tanah Kosong (Konsultan Bantuan Jasa Penilai Publik)	2019	50.699.000,00
Pembersihan Lokasi Pelabuhan Terminal Tanjung Ular	2019	499.478.000,00
Bangunan Venue sport hall	2020	21.068.256.890,00
Bangunan Stadion	2020	25.762.103.624,00

Uraian	Tahun	Jumlah (Rp)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		175.950.000,00
Pengadaan tanah sumur dewa dan makam	2014	22.355.000,00
Landscape jalan setapak Gunung Menumbing	2018	7.130.000,00
Buku Pengetahuan Umum (buku Penyusunan DED/SID Pariwisata batu rakit	2019	104.010.000,00
Jasa Kons tempat parkir di Menumbing	2020	15.670.000,00
Jasa Kons perencana turis information center (TIC)	2020	16.170.000,00
Jasa Kons Perencana Landscape Menumbing	2020	10.615.000,00
DPM Nakertrans		277.548.100,00
DED Buku Laporan/Dokumen Perencanaan Pembangunan Kawasan	2012	221.333.100,00
DED Buku Laporan Identifikasi Kawasan Transmigrasi	2012	56.215.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan		178.007.900,00
Tambatan Perahu Sungai Kampak Jebus	2014	25.050.000,00
Tambatan Perahu Sukal	2015	35.000.000,00
Tambatan Perahu Rambat	2015	35.000.000,00
Pagar BBI	2015	77.957.900,00
Jasa Konsultan perenc. Pemb. TPI Cupat	2019	5.000.000,00
Dinas Kesehatan		193.958.000,00
Rumah Sakit Pratama Kelapa (Master Plan)	2014	193.958.000,00
Sekretariat DPRD		305.982.000,00
Jasa Kons Perencana Pembg Pagar	2016	19.760.000,00
Jasa Kons Perencana Koridor Gedung	2016	9.900.000,00
Jasa Kons Perencana Rehab Gedung Kantor	2021	99.869.000,00
Jasa Kons Perencana Interior Gedung Kantor	2021	99.970.000,00
Jasa Kons Perencana Pagar Kantor	2021	21.769.000,00
Jasa Kons Perencana Koridor Kantor	2021	19.899.000,00
Jasa Kons Perencana Ruang Komisi	2021	34.815.000,00
BLUD		77.655.000,00
DED Pagar RSUD	2016	20.460.000,00
DED Kantin RSUD	2016	10.395.000,00

Uraian	Tahun	Jumlah (Rp)
Konsultan Perencanaan Gedung Poli	2018	46.800.000,00
Sub Total		51.544.960.614,00

Mutasi KDP

Mutasi KDP yang terjadi selama Tahun 2021 bertambah sebesar Rp616.571.155,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp11.040.000,00.

Penjelasan mutasi aset tetap KDP adalah sebagai berikut :

Saldo Akhir per 31 Desember 2020 (Rp)			50.939.429.459,00
Mutasi Bertambah (Rp)			
1.	Pengadaan/Belanja Modal	616.571.155,00	
2.	Hibah	0,00	
3.	Mutasi Antar OPD	0,00	
4.	Koreksi Nilai/Persediaan	0,00	
5.	Belum Tercatat	0,00	
6.	Reklas	0,00	
7.	Selain Pengadaan	0,00	
	Jumlah Mutasi Bertambah		676.571.155,00
Mutasi Berkurang (Rp)			
1.	Dihapus	0,00	
2.	Mutasi Antar OPD	0,00	
3.	Koreksi Nilai/Persediaan	0,00	
4.	Hibah	0,00	
5.	Reklas	11.040.000,00	
	Jumlah Mutasi Berkurang		11.040.000,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2021 (Rp)			51.544.960.614,00

Mutasi Penambahan KDP

Penambahan KDP di Tahun 2020 umumnya merupakan penambahan dari pengadaan aset tetap yang belum sempurna/selesai proses konstruksi maupun pengadaannya. Aset tetap yang belum selesai proses pembangunannya tersebut dikategorikan konstruksi dalam pengerjaan. Jika aset tetap tersebut sudah selesai proses pengadaannya, sudah diserahterimakan dan siap digunakan, maka aset tetap tersebut akan dipindahkan ke dalam golongan aset tetap sesuai golongan asetnya.

Mutasi Berkurang KDP

KDP dapat dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria berikut :

- Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Suatu KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan sudah diserahterimakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Rincian KDP per OPD Tahun 2021 sebagai berikut :

OPD	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	193.958.000,00	0,00	0,00	193.958.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	776.183.800,00	98.329.000,00	0,00	874.512.800,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	49.219.426.659,00	241.920.155,00	0,00	49.461.346.814,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	277.548.100,00	0,00	0,00	277.548.100,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	175.950.000,00	0,00	0,00	175.950.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00

OPD	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Dinas Kelautan dan Perikanan	178.007.900,00	0,00	0,00	178.007.900,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	40.700.000,00	276.322.000,00	11.040.000,00	305.982.000,00
Kecamatan Muntok	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Simpang Teritip	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Jebus	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kelapa	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Tempilang	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Parittiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
BLUD	77.655.000,00	0,00	0,00	77.655.000,00
Total	50.939.429.459,00	616.571.155,00	11.040.000,00	51.544.960.614,00

Penghentian KDP

Dalam beberapa kasus suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena tidak tersedianya dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca. Namun apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca.

3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur

ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.

Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

Masa Manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang dapat digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa :

- a. peralatan dan mesin;
- b. gedung dan bangunan; dan
- c. jalan, irigasi, dan jaringan;

Penyusutan tidak dilakukan terhadap :

- a. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa Aset Tetap Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tetap *Idle*;
- b. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan/atau telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk diproses TGR atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan untuk dilakukan penghapusan;
- d. Aset tetap yang direncanakan untuk dipindahtangankan; dan
- e. Aset Tetap berupa tanah, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Metode dan Penghitungan Penyusutan Aset Tetap

Metode penyusutan aset tetap yang digunakan adalah metode garis lurus dengan nilai residu adalah Rp0,00 (nol Rupiah). Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana. Metode garis lurus (*straight line method*) merupakan metode yang menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, bahwa perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan per tahun, namun karena sistem pencatatan akrual dan aplikasi SIMDA BMD yang menggunakan metode per bulan dalam penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap.

Masa manfaat aset tetap dapat dilihat berdasarkan tabel berikut :

Kode				Uraian	Masa	
1	3	2		Golongan Peralatan Dan Mesin		
1	3	2	01	Alat Besar		
1	3	2	01	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	01	03	Alat-Alat Bantu	7
1	3	2	02		Alat Angkutan	
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	02	05	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	03		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5
1	3	2	04		Alat Pertanian	
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	4
1	3	2	05		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	05	03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	06		Alat Studio. Komunikasi. dan Pemancar	
1	3	2	06	01	Alat Studio	5
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
1	3	2	07		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	08		Alat Laboratorium	
1	3	2	08	01	Unit Alar Laboratorium	8
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah	10
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan	10

Kode					Uraian	Masa
1	3	2	08	06	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory	10
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumen	8
1	3	2	09		Alat Persenjataan	
1	3	2	09	01	Senjata Api	10
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	3
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	3
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	01	Komputer Unit	5
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	5
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	7
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	7
1	3	2	12		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	7
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	7
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	
1	3	2	13	01	Sumur	7
1	3	2	13	02	Produksi	7
1	3	2	13	03	Pengolahan dan Pemurnian	7
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	7
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	7
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	5
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	03	Alat SAR	5
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	5
1	3	2	16		Alat Peraga	
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	4
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	5
1	3	2	18		Rambu-Rambu	
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5

Kode					Uraian	Masa
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	5
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga	
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga	5
1	3	3			Golongan Gedung Dan Bangunan	
1	3	3	01		Bangunan Gedung	
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	02		Monumen	
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	03		Bangunan Menara	
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	04		Tugu Titik Kontrol/ Pasti	
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	50
1	3	4			Golongan Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	
1	3	4	01		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	01	01	Jalan	10
1	3	4	01	02	Jembatan	50
1	3	4	02		Bangunan Air	
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	25
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai Dan Penanggulangan	10
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	30
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/ Baku	40
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	03		Instalasi	
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	30
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	20

Kode					Uraian	Masa
1	3	4	03	10	Intalasi Lain	20
1	3	4	04		Jaringan	
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	40
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	20
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	30

Perhitungan penyusutan dilakukan secara bulanan tanpa memperhitungkan tanggal perolehan pada bulan tersebut dan disajikan laporannya secara semesteran. Adapun rumus perhitungannya dipengaruhi oleh kondisi sebagai berikut :

- 1) Aset Tetap tanpa adanya kapitalisasi
Aset tetap tanpa adanya kapitalisasi disusutkan berdasarkan nilai perolehannya dibagi estimasi masa manfaat, tanpa memperhitungkan nilai sisa dengan contoh perhitungan sebagai berikut :

DAFTAR PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN

Sampai dengan 31-Des-2016

Bidang : Sekwan / DPRD
Unit Organisasi : Sekretariat Dewan
Sub Unit Organisasi : Sekretariat Dewan
UPB : Sekretariat Dewan

No.	Kode Aset	No. Reg	Nama Aset	Masa Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Sisa Masa Manfaat		Akumulasi Penyusutan 1 Jan 2016 (Rp)	Penyusutan		Akumulasi Penyusutan 31 Des 2016 (Rp)	Nilai Buku (Rp)	
						Thn	Bln		Semester I (Rp)	Semester II (Rp)			
1. Gedung dan Bangunan					6.000.000.000			650.000.000	60.000.000	60.000.000	770.000.000	5.230.000.000	
1	1.11.1.1.1	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8	2010	6.000.000.000	43	7	650.000.000	60.000.000	60.000.000	770.000.000	5.230.000.000

	GEDUNG KANTOR	KETERANGAN
1	Nilai	6.000.000.000.00
2	Tanggal Perolehan	19 Agustus 2010
3	Masa Manfaat 50 Tahun (50 x 12 Bln) Agustus 2010 - Juli 2060	600 Bulan
4	Penyusutan Perbulan (6.000.000.000/600 Bulan)	10.000.000,00
5	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2015 (65 Bulan)	65 Bulan
	- 19/08/2010 sd 31/12/2010 = 5 Bln	5 Bulan
	- 01/01/2011 sd 31/12/2015 = 60 Bln	60 Bulan

	GEDUNG KANTOR	KETERANGAN
	65 Bulan x Rp.10.000.000	650.000.000,00
6	Penyusutan Tahun 2016 (12 Bulan)	
	- Semester 1 = 6 Bulan x Rp10.000.000	60.000.000,00
	- Semester 2 = 6 Bulan x Rp10.000.000	60.000.000,00
7	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2016 (77 Bulan)	770.000.000,00
8	Nilai Buku Per 31 Desember 2016	5.230.000.000,00
9	Sisa Masa Manfaat sd 31 Desember 2016 (600-77 Bulan)	523 Bulan
	- 43 Tahun = 43 x 12 Bln (sd 2059)	516 Bulan
	- 7 Bulan (di tahun 2060)	7 Bulan

Pada metode perhitungan diatas jumlah bulan penyusutan pada tahun 2010 hanya dihitung 5 bulan dari bulan Agustus sampai dengan Desember 2010 dan tidak dihitung 12 bulan (1 tahun penuh) karena SIMDA BMD menggunakan perhitungan penyusutan aset berdasarkan model bulanan dan bukan menggunakan metode tahunan.

Untuk perhitungan penyusutan perbulan didapat dari nilai perolehan aset dibagi dengan masa manfaat aset sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan nilai penyusutan setiap bulannya sebesar Rp10.000.000,00 (Rp6.000.000.000,00/600 bulan).

Sehingga untuk penyusutan tahun 2016 semester I dan II adalah masing-masing sebesar Rp60.000.000,00 (6 Bulan x Rp10.000.000,00) dengan akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp770.000.000,00 dan nilai buku aset Rp5.230.000.000,00 (Rp6.000.000.000,00-Rp770.000.000,00) dengan nilai sisa manfaat 43 tahun dan 7 bulan atau 523 bulan.

2) Aset Tetap Dengan Kapitalisasi

Aset tetap yang dikapitalisasi memperhitungkan akumulasi dan nilai buku sebelum

Kapitalisasi dilakukan serta sisa manfaat aset dari aset awal ditambah dengan manfaat tambahan dari kapitalisasi yang dilakukan. Contoh perhitungan aset tetap dengan kapitalisasi (renovasi) dapat disajikan sebagai berikut :

DAFTAR PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN
Sampai dengan 31-Des-2017

Bidang : Sekwan / DPRD
Unit Organisasi : Sekretariat Dewan
Sub Unit Organisasi : Sekretariat Dewan
UPB : Sekretariat Dewan

No.	KODE ASET	NO. REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2017	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31 Des 2017	NILAI BUKU	
						Thn	Bln		Semester I	Semester II			
I. Gedung dan Bangunan					6.000.000.000			770.000.000	56.557.659	54.836.489	881.394.148	5.218.605.852	
1	1.11.1.1.1	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8	2010	6.000.000.000	43	7	770.000.000	56.557.659	54.836.489	881.394.148	5.218.605.852

A	GEDUNG KANTOR	KETERANGAN
1	Nilai	6.000.000.000,00
2	Tanggal Perolehan	19 Agustus 2010
3	Masa Manfaat 50 Tahun (50 x 12 Bln) Agustus 2010 - Juli 2060	600 Bulan
4	Penyusutan Perbulan (6.000.000.000/600 Bulan)	10.000.000,00
5	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2015 (65 Bulan)	65 Bulan
	- 19/08/2010 sd 31/12/2010 = 5 Bln	5 Bulan
	- 01/01/2011 sd 31/12/2015 = 60 Bln	60 Bulan
	65 Bulan x 10.000.000	650.000.000,00
6	Penyusutan Tahun 2016 (12 Bulan)	
	- Semester 1 = 6 Bulan x 10.000.000	60.000.000,00
	- Semester 2 = 6 Bulan x 10.000.000	60.000.000,00
7	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2016 (77 Bulan)	770.000.000,00
8	Nilai Buku Per 31 Desember 2016	5.230.000.000,00
9	Sisa Masa Manfaat sd 31 Desember 2016 (600-77 Bulan)	523 Bulan
	- 43 Tahun = 43 x 12 Bln (sd 2059)	516 Bulan
	- 7 Bulan (di tahun 2060)	7 Bulan

B	GEDUNG KANTOR (KAPITALISASI)	KETERANGAN
1	Nilai Kapitalisasi	100.000.000,00
2	Nilai Perolehan Setelah Kapitalisasi (A1+B1)	6.100.000.000,00
3	Tanggal Perolehan Kapitalisasi	01 Maret 2017
4	Tambahan Masa Manfaat Kapitalisasi 5 Tahun (5 x 12 Bulan)	60 Bulan

B	GEDUNG KANTOR (KAPITALISASI)	KETERANGAN
5	Nilai Disusutkan (NB 2016 + NKAPITALISASI-PENY 2 BLN 1 JAN -28 FEB) A8 + B1-20.000.000	5.310.000.000,00
6	Sisa Masa Manfaat sd 01/03/2017 (TIDAK BOLEH LEBIH 600 BLN <=A3)	581
	- Masa 31 Desember 2016 sd 1 Maret 2017 (A9-2 BLN) 523 BLN-2 BLN	521
	- Tambahan Masa Kapitalisasi (B4)	60
7	Besarnya Penyusutan Perbulan di Tahun 2017	
	- Januari - Februari 2017 (2 Bulan) Menggunakan Penyusutan Awal Sebelum Kapitalisasi	10.000.000,00
	- Maret - Desember 2017 (10 Bulan) Menggunakan Penyusutan Kapitalisasi (B5/B6)	9.139.415,00
8	Penyusutan Tahun 2017	111.394.148,00
	- Semester I	56.557.659,00
	1 Jan 2017 - 28 Februari 2017 (2 Bln x 10.000.000 (B7)) = 20.000.000	
	1 Maret 2017 - 31 Desember 2017 (4 Bln x 9.139.415 (B7)) = 36.557.659	
	- Semester II = 6 Bulan x B 7 (6 Bulan x 9.139.415)	54.836.489,00
9	Akumulasi Penyusutan sd Per 31 Desember 2017 (A7 + B8)	881.394.148,00
10	Nilai Buku Per 31 Desember 2017	5.218.605.852,00
11	Sisa Masa Manfaat sd 31 Desember 2017 (A9+B4-12 Bulan)	571
	- 47 Tahun = 47 x 12 Bln (Sd Tahun 2064)	564
	- 7 Bulan (di tahun 2065)	7

Pada perhitungan diatas terlihat perbedaan perhitungan metode aset tanpa adanya kapitalisasi dengan metode kapitalisasi. Hal ini karena sudah memperhitungkan umur manfaat tambahan dari renovasi tanpa menambah masa manfaat aset melebihi selama 50 tahun (600 bulan) dalam contoh diatas setelah kapitalisasi masa manfaat aset tersebut menjadi 581 bulan.

Nilai aset yang akan disusutkan setelah penambahan biaya renovasi menjadi Rp5.310.000.000,00 per 1 Maret 2017 sehingga mulai Maret 2017 (penambahan biaya kapitalisasi tersebut dimulai sejak 1 Maret 2017) biaya penyusutan perbulan berubah yang awal Rp10.000.000,00 menjadi Rp9.139.415,00.

Akumulasi Penyusutan sampai dengan Per 31 Desember 2017 (A7 + B8) menjadi Rp881.394.148,00. Sehingga Nilai Buku Per 31 Desember 2017 menjadi Rp5.218.605.852,00 dengan Sisa Masa Manfaat sampai dengan 31

Desember 2017 (A9+B4-12 Bulan) tersisa 47 tahun 7 Bulan atau sama dengan 571 bulan.

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap per Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Akumulasi Penyusutan Aset Tetap OPD
Per 31 Desember 2021**

OPD	Nilai Bruto Aset Tetap (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Bersih Aset Tetap (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	359.437.780.127,00	129.297.326.378,00	230.140.453.749,00
Dinas Kesehatan	214.014.944.522,00	101.322.318.933,00	112.692.625.589,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.581.454.435.929,00	1.070.799.665.777,00	510.654.770.152,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	145.923.574.979,00	30.007.260.341,00	115.916.314.638,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.838.592.995,00	4.308.153.643,00	1.530.439.352,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	170.721.850,00	170.721.850,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	3.041.505.860,00	1.882.189.762,00	1.159.316.098,00
Dinas Pertanian dan Pangan	32.677.739.435,00	17.489.692.836,00	15.188.046.599,00
Dinas Lingkungan Hidup	30.676.945.759,00	20.042.161.659,00	10.634.784.100,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.132.644.898,00	1.862.444.987,00	2.270.199.911,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.609.600.651,00	4.873.765.355,00	4.735.835.296,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	8.193.989.629,00	4.551.503.097,00	3.642.486.532,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	35.092.266.708,00	9.772.560.452,00	25.319.706.256,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	6.501.438.373,00	3.522.755.032,00	2.978.683.341,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	35.030.375.398,00	10.381.321.825,00	24.649.053.573,00
Dinas Perpustakaan dan	17.276.510.663,00	1.949.909.521,00	15.326.601.142,00

OPD	Nilai Bruto Aset Tetap (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Bersih Aset Tetap (Rp)
Kearsipan			
Dinas Kelautan dan Perikanan	9.802.866.713,00	3.911.273.698,00	5.891.593.015,00
Sekretariat Daerah	93.263.563.595,00	32.813.097.334,00	60.450.466.261,00
Sekretariat DPRD	20.463.648.852,00	9.140.790.526,00	11.322.858.326,00
Kecamatan Muntok	11.048.235.656,00	3.052.708.770,00	7.995.526.886,00
Kecamatan Simpang Teritip	5.338.872.334,00	1.549.037.905,00	3.789.834.429,00
Kecamatan Jebus	5.345.922.118,00	2.454.565.197,00	2.891.356.921,00
Kecamatan Kelapa	5.368.923.642,00	2.261.412.493,00	3.107.511.149,00
Kecamatan Tempilang	4.809.773.305,00	1.883.342.505,00	2.926.430.800,00
Kecamatan Parittiga	6.583.734.646,00	2.240.439.838,00	4.343.294.808,00
Inspektorat Daerah	2.530.941.192,00	1.806.522.599,00	724.418.593,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	6.248.704.079,00	3.647.823.178,00	2.600.880.901,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	6.647.122.346,00	3.967.950.165,00	2.679.172.181,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	5.990.187.343,00	4.583.269.031,00	1.406.918.312,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	13.033.425.865,00	6.325.747.849,00	6.707.678.016,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.550.355.161,00	1.021.710.332,00	528.644.829,00
BLUD	8.604.880.964,00	4.668.301.602,00	3.936.579.362,00
Total	2.695.704.225.587,00	1.497.561.744.470,00	1.198.142.481.117,00

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.497.561.744.470,00 dan Rp1.389.299.179.875,00.

Penjelasan mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap adalah sebagai berikut :

Saldo Akhir per 31 Desember 2020 (Rp)		1.389.299.179.875,00
Mutasi Bertambah (Rp)		
1.	Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2021	112.092.171.076,00
2.	Hibah	0,00
3.	Mutasi Antar OPD	2.347.433.885,00
4.	Koreksi Akumulasi	34.731.787,00
5.	Belum Tercatat	0,00
6.	Reklas	995.310.926,00

7.	Pembulatan	0,00	
	Jumlah Mutasi Bertambah		115.469.647.674,00
	Mutasi Berkurang (Rp)		
1.	Dihapus	3.184.061.001,00	
2.	Mutasi Antar OPD	2.876.666.820,00	
3.	Koreksi Nilai	87.000.000,00	
4.	Hibah	0,00	
5.	Reklas	1.059.355.258,00	
6.	Pembulatan	0,00	
	Jumlah Mutasi Berkurang		7.207.083.079,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2021 (Rp)		1.497.561.744.470,00

Rincian mutasi bertambah dan berkurang akumulasi penyusutan aset tetap per OPD Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

OPD	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	115.419.467.585,00	14.307.424.149,00	429.565.356,00	129.297.326.378,00
Dinas Kesehatan	92.470.880.367,00	9.172.371.166,00	320.932.600,00	101.322.318.933,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.000.626.140.886,00	71.830.584.189,00	1.657.059.298,00	1.070.799.665.777,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	25.764.716.344,00	4.449.484.976,00	206.940.979,00	30.007.260.341,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.840.232.540,00	467.921.103,00	0,00	4.308.153.643,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	170.721.850,00	0,00	170.721.850,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	1.839.495.604,00	42.694.158,00	0,00	1.882.189.762,00
Dinas Pertanian dan Pangan	16.866.458.937,00	1.567.858.130,00	944.624.231,00	17.489.692.836,00
Dinas Lingkungan Hidup	18.929.711.719,00	1.127.691.607,00	15.241.667,00	20.042.161.659,00

OPD	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.526.249.116,00	342.362.535,00	6.166.664,00	1.862.444.987,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.439.188.697,00	434.576.658,00	0,00	4.873.765.355,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	4.181.126.328,00	399.515.969,00	29.139.200,00	4.551.503.097,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	8.947.763.509,00	824.796.943,00	0,00	9.772.560.452,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3.368.455.958,00	154.299.074,00	0,00	3.522.755.032,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	9.530.174.691,00	851.147.134,00	0,00	10.381.321.825,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.705.866.882,00	333.153.704,00	89.111.065,00	1.949.909.521,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	3.507.598.592,00	403.675.106,00	0,00	3.911.273.698,00
Sekretariat Daerah	30.973.527.191,00	4.637.842.599,00	2.798.272.456,00	32.813.097.334,00
Sekretariat DPRD	8.825.518.439,00	587.574.620,00	272.302.533,00	9.140.790.526,00
Kecamatan Muntok	2.489.877.957,00	562.830.813,00	0,00	3.052.708.770,00
Kecamatan Simpang Teritip	1.438.728.877,00	110.309.028,00	0,00	1.549.037.905,00
Kecamatan Jebus	2.251.496.082,00	203.069.115,00	0,00	2.454.565.197,00
Kecamatan Kelapa	1.969.256.468,00	292.156.025,00	0,00	2.261.412.493,00
Kecamatan Tempilang	1.785.170.641,00	98.171.864,00	0,00	1.883.342.505,00
Kecamatan Parittiga	2.094.507.822,00	145.932.016,00	0,00	2.240.439.838,00
Inspektorat Daerah	1.723.452.440,00	83.070.159,00	0,00	1.806.522.599,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan	3.476.643.854,00	171.179.324,00	0,00	3.647.823.178,00

OPD	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Daerah				
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	3.798.198.113,00	200.335.282,00	30.583.230,00	3.967.950.165,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	4.330.300.756,00	252.968.275,00	0,00	4.583.269.031,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	5.922.101.666,00	403.646.183,00	0,00	6.325.747.849,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.360.188.730,00	21.971.902,00	360.450.300,00	1.021.710.332,00
BLUD	3.896.683.084,00	818.312.018,00	46.693.500,00	4.668.301.602,00
Total	1.389.299.179.875,00	115.469.647.674,00	7.207.083.079,00	1.497.561.744.470,00

Aset Tetap Bernilai Buku Rp0,00 (Nol Rupiah)

Aset tetap yang sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp0,00 (Nol Rupiah). Namun secara teknis aset itu dalam kondisi baik dan masih dapat dimanfaatkan, oleh karena itu aset tetap tersebut masih tetap dicatat dan disajikan dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan dan dilaporkan dalam neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya. Berikut rincian data aset tetap yang bernilai buku Rp0,00 (Nol Rupiah) :

OPD	Nilai Perolehan Aset Tetap yang Bernilai Buku Nol Rupiah (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	45.412.998.495,00
Dinas Kesehatan	58.725.588.594,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	751.988.815.994,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	6.657.042.998,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.085.396.577,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	170.721.850,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	1.516.789.485,00
Dinas Pertanian dan Pangan	7.606.806.299,00
Dinas Lingkungan Hidup	11.530.810.800,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	791.502.145,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.117.712.655,00

OPD	Nilai Perolehan Aset Tetap yang Bernilai Buku Nol Rupiah (Rp)
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.478.008.883,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	2.488.314.637,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.590.765.370,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.624.407.429,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.060.170.921,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	1.687.365.558,00
Sekretariat Daerah	15.319.599.878,00
Sekretariat DPRD	5.722.506.803,00
Kecamatan Muntok	1.174.179.735,00
Kecamatan Simpang Teritip	817.941.340,00
Kecamatan Jebus	1.082.474.562,00
Kecamatan Kelapa	611.955.300,00
Kecamatan Tempilang	850.766.918,00
Kecamatan Parittiga	1.422.210.299,00
Inspektorat Daerah	1.283.209.757,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	2.656.042.292,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	2.837.591.538,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	3.745.288.230,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3.674.442.815,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	823.412.501,00
BLUD	2.315.886.026,00
Total	949.870.726.684,00

Jika aset tetap tersebut dalam kondisi rusak berat.maka aset tetap tersebut dilaporkan dalam aset lainnya. Aset tetap dalam kondisi nilai bukunya menjadi Rp0,00 (Nol Rupiah) dapat dilakukan penghapusannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aset Bernilai di Bawah Kapitalisasi

Terdapat Aset di Bawah Kapitalisasi Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

OPD	Nilai Aset Di Bawah Kapitalisasi (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	71.633.245.629,00

OPD	Nilai Aset Di Bawah Kapitalisasi (Rp)
Dinas Kesehatan	2.531.324.506,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68.304.975,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	1.170.167.400,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	62.475.834,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	81.149.407,00
Dinas Pertanian dan Pangan	238.589.483,00
Dinas Lingkungan Hidup	396.399.420,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17.342.762,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	137.471.187,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	226.022.957,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	269.522.758,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	115.196.224,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	310.981.179,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	844.074.207,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	56.714.529,00
Sekretariat Daerah	456.151.128,00
Sekretariat DPRD	311.252.271,00
Kecamatan Muntok	214.555.627,00
Kecamatan Simpang Teritip	86.437.624,00
Kecamatan Jebus	67.019.766,00
Kecamatan Kelapa	273.489.425,00
Kecamatan Tempilang	60.522.452,00
Kecamatan Parittiga	45.681.500,00
Inspektorat Daerah	68.574.586,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	183.838.391,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	49.425.667,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	84.616.822,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	361.146.316,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	151.136.884,00
BLUD	336.898.099,00
Total	80.909.729.015,00

3.1.5 Aset Lainnya

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, bahwa suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tersebut sudah tidak memenuhi definisi aset tetap sehingga harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset tetap dimaksud adalah aset tetap yang memiliki kondisi rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan dan penyertaan modal).

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Aset Lainnya Per 31 Desember 2021

Keterangan	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Tuntutan Perbendaharaan	0,00	0,00
Tuntutan Ganti Rugi	2.613.077.591,15	2.851.144.852,15
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	4.147.487.675,00	4.147.487.675,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(4.068.556.996,00)	(3.964.801.693,00)
Aset Lain-lain	131.533.106.287,00	95.209.641.622,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(44.316.871.865,00)	(44.531.771.080,00)
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	209.944,00	0,00
Total	89.908.452.636,15	53.711.701.376,15

3.1.5.3 Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan ganti rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau

kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp2.613.077.591,15 yang terdapat pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason.

3.1.5.4 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

3.1.5.5 Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud merupakan aset yang berupa aplikasi/software tertentu atau aplikasi/software khusus yang masih digunakan untuk menunjang kerja pegawai, sedangkan aplikasi/software yang tidak digunakan lagi diklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Khusus untuk aset tak berwujud, dalam penatausahaan aset tetap dimasukkan ke dalam ekstra komptabel namun di neraca disajikan sebagai aset tak berwujud dan dilakukan penghitungan amortisasinya.

Mutasi Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.147.487.675,00. Tahun 2021, tidak terdapat penambahan aset tak berwujud.

Rincian mutasi aset tak berwujud adalah sebagai berikut :

No	OPD	31 Desember 2020 Audited (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	218.221.000,00	0,00	0,00	218.221.000,00
2.	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.242.835.743,00	0,00	0,00	2.242.835.743,00
3.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	10.191.185,00	0,00	0,00	10.191.185,00
4.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	418.165.000,00	0,00	0,00	418.165.000,00
5.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	68.078.925,00	0,00	0,00	68.078.925,00
6.	Sekretariat DPRD	38.919.100,00	0,00	0,00	38.919.100,00

No	OPD	31 Desember 2020 Audited (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.	Kecamatan Muntok	85.785.000,00	0,00	0,00	85.785.000,00
8.	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	62.200.000,00	0,00	0,00	62.200.000,00
9.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	375.421.722,00	0,00	0,00	375.421.722,00
10.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	284.850.000,00	0,00	0,00	284.850.000,00
11.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	216.320.000,00	0,00	0,00	216.320.000,00
12.	BLUD	126.500.000,00	0,00	0,00	126.500.000,00
	Total	4.147.487.675,00	0,00	0,00	4.147.487.675,00

3.1.5.5 Amortisasi Aset Tak Berwujud

Metode dan Penghitungan Amortisasi Aset Tak Berwujud

Metode amortisasi aset tak berwujud yang digunakan adalah metode garis lurus dengan nilai residu adalah Rp0,00 (Nol Rupiah).

Metode garis lurus (*straight line method*) merupakan metode yang menetapkan tarif amortisasi untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bahwa perhitungan dan pencatatan amortisasi aset tak berwujud dilakukan per tahun.

Formula besaran persentase amortisasi per bulan adalah :

Persentase amortisasi per bulan = $\frac{\text{Nilai yang dapat diamortisasi}}{12 \text{ Masa Manfaat}}$

Berikut daftar Aset tidak berwujud, akumulasi amortisasi dan nilai buku aset tak berwujud Kabupaten Bangka Barat per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

No	OPD	Aset Tidak Berwujud (Rp)	Akumulasi Amortisasi (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	218.221.000,00	218.221.000,00	0,00
2.	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.242.835.743,00	2.208.185.743,00	34.650.000,00

No	OPD	Aset Tidak Berwujud (Rp)	Akumulasi Amortisasi (Rp)	Nilai Buku (Rp)
3.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	10.191.185,00	10.191.185,00	0,00
4.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	418.165.000,00	418.165.000,00	0,00
5.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	68.078.925,00	64.818.745,00	3.260.180,00
6.	Sekretariat DPRD	38.919.100,00	38.919.100,00	0,00
7.	Kecamatan Muntok	85.785.000,00	76.201.667,00	9.583.333,00
8.	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	62.200.000,00	62.200.000,00	0,00
9.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	375.421.722,00	375.421.722,00	0,00
10.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	284.850.000,00	266.214.167,00	18.635.833,00
11.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	216.320.000,00	203.518.667,00	12.801.333,00
12.	BLUD	126.500.000,00	126.500.000,00	0,00
Total		4.147.487.675,00	4.068.556.996,00	78.930.679,00

3.1.5.7 Aset Lain-lain

Aset lain-lain merupakan aset Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang dimiliki oleh pemerintah daerah yaitu :

- secara permanen sudah dihentikan atau dilepas dari penggunaan aktif pemerintah karena rusak berat sehingga tidak bisa digunakan lagi secara normal dalam operasional dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang,
- dipinjampakaikan oleh instansi lain untuk jangka waktu tertentu,
- digunakan oleh instansi lain untuk tujuan akhir diserahkan,
- aset hilang/tidak diketahui keberadaannya, dan
- kerugian daerah yang belum ditetapkan sebagai tuntutan perbendaharaan.

Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pada neraca per 31 Desember 2021 disajikan aset lain-lain sebesar Rp131.533.106.287,00 berupa aset rusak berat, aset *idle* atau aset yang belum dimanfaatkan oleh OPD lain yang dikelola oleh Pengelola Barang, dan aset yang dipinjampakaikan/dimanfaatkan oleh instansi lain untuk jangka waktu tertentu dan kerugian daerah yang disebabkan oleh bendahara yang belum ditetapkan sebagai tuntutan perbendaharaan.

Rincian Aset lain-lain adalah sebagai berikut :

OPD	Rusak Berat (Rp)	Dimanfaatkan Pihak Lain (Rp)	Aset Idle (Rp)	Kerugian Daerah (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	7.606.904.790,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	12.079.940.764,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.106.117.760,00	47.793.617.887,00	0,00	0,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	90.915.000,00	4.028.710.967,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	391.840.156,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	380.000.300,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.418.070.586,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian dan Pangan	1.054.240.217,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	621.144.645,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	585.848.900,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	119.687.592,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.583.307.098,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	269.772.703,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.068.306.602,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	223.259.755,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	867.083.166,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	114.482.080,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	450.090.424,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	618.077.584,00	2.701.129.163,00	0,00	0,00
Kecamatan Muntok	604.874.243,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Simpang Teritip	114.654.398,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Jebus	106.585.500,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kelapa	349.371.000,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Tempilang	133.979.315,00	0,00	0,00	0,00

OPD	Rusak Berat (Rp)	Dimanfaatkan Pihak Lain (Rp)	Aset Idle (Rp)	Kerugian Daerah (Rp)
Kecamatan Parittiga	216.033.000,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	171.622.267,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	570.435.927,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	532.366.950,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	372.439.240,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	303.528.209,00	0,00	0,00	0,00
BLUD	194.390.549,00	0,00	0,00	0,00
PPKD/Pengelola	0,00	0,00	38.453.877.416,00	236.400.134,00
Total	38.319.370.720,00	54.523.458.017,00	38.453.877.416,00	236.400.134,00

Berikut rincian aset dipinjam pakai/dimanfaatkan oleh instansi lain untuk jangka waktu tertentu:

No	OPD	Aset Pinjam Pakai/ Dimanfaatkan pihak lain	Nilai (Rp)	Instansi Pinjam Pakai
1	Sekretariat Daerah	Peralatan dan Mesin	2.701.129.163,00	PDAM. BAZDA. dll.
2	Dinas Pekerjaan Umum	Gedung dan bangunan	3.268.379.000,00	Masyarakat dan pihak ketiga
		Jalan Irigasi dan Jaringan	44.525.238.887,00	
3	Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Spam IKK. Jaringan Pipa Kelurahan Sungai Daeng dan Jaringan Kelurahan Tanjung	4.028.710.967,00	Masyarakat dan pihak ketiga
Total			54.523.458.017,00	

Dari total Aset lain-lain sebesar Rp131.533.106.287,00 tersebut terdapat kerugian daerah yang disebabkan oleh bendahara pengeluaran sebesar Rp236.400.134,00 yang masih dalam proses penetapan tuntutan perbendaharaan. Informasi kerugian daerah tersebut berdasarkan Audit Khusus Inspektorat Kabupaten Bangka Barat dengan Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor 700/005/IRDA/2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Laporan Hasil Audit Khusus atas Disposisi Bupati Bangka Barat pada BP2RD Kabupaten Bangka Barat TA 2020. Audit tersebut dilaksanakan sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SPT) Bupati Bangka Barat Nomor: 700/001/SPT.KHUSUS/6/01.0.00.0.00.01.00/2021 tanggal 04 Januari 2021. SPT tersebut berdasarkan Nota Dinas BP2RD Nomor 523/679.A/4.4.2.1/2020 tanggal

28 Desember 2020 perihal Permohonan Audit Khusus atas dugaan pembayaran belanja oleh Bendahara Pengeluaran yang belum diterima oleh yang berhak.

Dalam proses pemeriksaan tersebut Inspektorat telah meminta Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tertanggal 17 Februari 2021 yang isinya Sdr. Swd menyatakan bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp249.350.134,00 yang terdiri dari pembayaran kerugian daerah sebesar Rp236.400.134,00 dan pembayaran cicilan koperasi pegawai BP2RD kepada KPRI Bina Praja sebesar Rp12.950.000,00. Berdasarkan SKTJM dan LHA tersebut Bupati Bangka Barat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 188.45/111/BPKAD/2021 tanggal 1 April 2021 tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara terhadap Sdr. Swd.

Atas hasil audit tersebut telah disampaikan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK melalui surat Nomor 962/171/BP2RD/2021 tanggal 17 April 2021 perihal Pemberitahuan terjadinya kekurangan uang/barang. Sampai dengan saat ini (LKPD *Audited* tanggal 25 Mei 2021) sedang dalam proses verifikasi oleh Panitera Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK.

Penunjukkan Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah TA 2020 yaitu atas nama Swd. ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/463/4.4.1.1/2020 tentang Perubahan ke Delapan atas Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/3.A/4.4.1.1/2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2020.

3.1.5.8 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain merupakan Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat dan Aset yang dipinjamkaikan ke Instansi pemerintah. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Tahun 2021 sebesar Rp44.291.571.865,00 dengan rincian per OPD sebagai berikut :

OPD	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	3.257.070.543,00
Dinas Kesehatan	11.482.503.548,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.159.169.517,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan	330.552.753,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	390.551.155,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	1.351.448.084,00

OPD	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain (Rp)
Dinas Pertanian dan Pangan	834.952.932,00
Dinas Lingkungan Hidup	595.375.430,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	580.688.901,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	117.373.469,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.454.939.932,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	268.607.566,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.025.236.224,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	134.636.832,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	859.119.408,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	66.880.416,00
Sekretariat Daerah	3.298.038.212,00
Sekretariat DPRD	425.512.558,00
Kecamatan Muntok	566.854.575,00
Kecamatan Simpang Teritip	86.747.485,00
Kecamatan Jebus	106.585.500,00
Kecamatan Kelapa	347.136.883,00
Kecamatan Tempilang	130.578.115,00
Kecamatan Parittiga	212.233.237,00
Inspektorat Daerah	169.245.673,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	399.581.589,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	529.828.218,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	370.953.824,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	253.910.716,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	380.000.300,00
BLUD	130.558.270,00
Total	44.316.871.865,00

Penghapusan Aset Lainnya

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Dalam hal Barang Milik Daerah yang sudah tidak berada dalam Penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah harus dilakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna. Nilai penghapusan aset lainnya pada

Tahun 2021 adalah senilai Rp2.393.590.926.00 dengan rincian per Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

OPD	Penghapusan				
	Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	Jalan, Jaringan dan Irigasi (Rp)	Aset Tetap Lainnya (Rp)	Total (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	0,00	300.453.500,00	0,00	0,00	300.453.500,00
Dinas Kesehatan					
Puskesmas Muntok	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	37.300.000,00	0,00	0,00	0,00	37.300.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	394.603.683,00	0,00	0,00	0,00	394.603.683,00
Sekretariat Daerah					
Bagian Hukum	81.730.000,00	0,00	0,00	0,00	81.730.000,00
Bagian Kesejahteraan Rakyat	45.313.333,00	0,00	0,00	0,00	45.313.333,00
Bagian Organisasi	7.634.946,00	0,00	0,00	0,00	7.634.946,00
Bagian Pemerintahan	88.020.697,00	0,00	0,00	0,00	88.020.697,00
Bagian Umum dan Protokoler	862.185.436,00	0,00	0,00	3.250.000,00	865.435.436,00
Rumah Dinas Bupati	47.996.925,00	0,00	0,00	0,00	47.996.925,00
Rumah Dinas Wakil Bupati	24.050.000,00	0,00	0,00	0,00	24.050.000,00
Kecamatan Jebus	76.100.750,00	0,00	0,00	0,00	76.100.750,00
Inspektorat Daerah	196.105.749,00	0,00	0,00	0,00	196.105.749,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	108.693.519,00	0,00	0,00	0,00	108.693.519,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	65.744.688,00	0,00	0,00	0,00	65.744.688,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	47.907.700,00	0,00	0,00	0,00	47.907.700,00
Total	2.089.887.426,00	300.453.500,00	0,00	3.250.000,00	2.393.590.926,00

- Berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor: 188.45/504.A/4.4.1.1/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 terdapat penghapusan aset lainnya senilai Rp165.453.500,00 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga yang pelaksanaan pemusnahan fisiknya telah selesai dilaksanakan pada tahun 2020, namun penghapusan pada pencatatannya baru diakomodir pada tahun 2021.

- Berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor: 188.45/338/BPKAD/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor: 188.45/366/BPKAD/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor: 188.45/338/BPKAD/2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 terdapat penghapusan aset lainnya senilai Rp2.221.637.426,00.
- Berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/355/BPKAD/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Akibat Adanya Penggantian Kerugian Negara Tahun 2021, terdapat penghapusan aset lainnya berupa 1 (satu) unit kendaraan dinas dengan harga perolehan yang tertera dalam buku inventaris senilai Rp6.500.000,00 dengan kondisi Rusak Berat. Penghapusan pencatatan sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Berita Acara Serah Terima Jaminan Nomor: 900/07/TPKD/2021 serta berdasarkan Usulan Penghapusan Barang Milik Daerah yang disampaikan oleh Pengguna Barang.

No	Kode Barang	Nomor Register	Nama/Jenis Barang	Perolehan		Kondisi
				Tahun	Nilai	
1.	02.02.01.04.001	0001	Sepeda Motor BN5051EZ Honda NF125	2005	6.500.000,00	RB

Rincian Penghapusan Aset Lainnya dapat dilihat pada Lampiran 9.

Secara keseluruhan, terdapat penghapusan Barang Milik Daerah pada tahun 2021 senilai Rp5.029.719.110,00 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Aset	Nilai (Rp)
Aset Tetap	Rp2.378.010.726,00
Aset Lain-lain	Rp2.393.590.926,00
Aset di Bawah Kapitalisasi	Rp258.117.458,00
Total	Rp5.029.719.110,00

Penghapusan aset di bawah kapitalisasi yang dilaksanakan dengan cara pemusnahan dengan rincian per OPD sebagai berikut :

Nama OPD	Jumlah	Nilai Penghapusan (Rp)	Dasar Penghapusan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	46	11.180.000,00	Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor: 188.45/338/BPKAD/2021 tanggal 31 Desember 2021
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Perhubungan	5	1.305.000,00	Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor: 188.45/338/BPKAD/2021 tanggal 31 Desember 2021
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	104	16.541.125,00	Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor: 188.45/338/BPKAD/2021 tanggal 31 Desember 2021
Inspektorat Daerah	19	5.522.484,00	Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor: 188.45/338/BPKAD/2021 tanggal 31 Desember 2021
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	250.000,00	Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor: 188.45/338/BPKAD/2021 tanggal 31 Desember 2021
Kecamatan Jebus	42	8.119.100,00	Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor: 188.45/338/BPKAD/2021 tanggal 31 Desember 2021
Sekretariat Daerah	557	93.530.749,00	Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor: 188.45/338/BPKAD/2021 tanggal 31 Desember 2021
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	5.882	121.669.000,00	Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor: 188.45/504.A/4.4.1.1/2020 tanggal 21 Desember 2020 (Rp19.450.000,00) dan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor: 188.45/338/BPKAD/2021 tanggal 31 Desember 2021
Total	6.657	258.117.458.00	

4.2.2 **Beban Persediaan**

Beban Persediaan merupakan beban atas penggunaan persediaan selama satu periode pelaporan. Beban persediaan didapat dengan menjumlahkan saldo persediaan awal tahun ditambah dengan pembelian persediaan tahun berjalan dan dikurangi dengan saldo persediaan akhir tahun. Beban persediaan tahun 2021 adalah sebesar Rp47.210.522.017,44 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Beban Persediaan-LO 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	8.313.261.488,00
2	Dinas Kesehatan	26.658.518.795,77
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	474.867.700,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	210.147.360,00
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana	135.472.124,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	202.243.666,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	190.973.854,57

No.	Uraian	Beban Persediaan-LO 2021 (Rp)
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	288.195.520,00
9	Dinas Pertanian dan Pangan	740.615.191,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	1.104.476.309,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	713.488.475,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	496.909.555,30
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	210.431.260,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	211.611.860,00
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	367.591.625,00
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	437.054.239,76
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	174.532.168,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	176.994.350,00
19	Sekretariat Daerah	1.927.352.887,04
20	Sekretariat DPRD	936.699.671,00
21	Kecamatan Muntok	630.519.110,00
22	Kecamatan Simpang Teritip	154.875.100,00
23	Kecamatan Jebus	200.618.750,00
24	Kecamatan Kelapa	227.173.350,00
25	Kecamatan Tempilang	146.069.046,00
26	Kecamatan Parittiga	149.939.200,00
27	Inspektorat Kabupaten	232.918.440,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	206.636.155,00
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	388.754.451,00
30	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	494.961.166,00
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	269.640.590,00
32	Kantor Penanggulangan Bencana dan Kesbangpol	52.088.860,00
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	84.889.700,00
	Total	47.210.522.017,44

Perhitungan Beban Persediaan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja persediaan mapping - LRA	33.327.492.556,62
2.	Bertambah :	74.217.292.688,83
	persediaan awal	57.895.610.796,93
	persediaan dari hibah	6.218.765.403,28
	penerimaan Persediaan dropping	956.665.438,67
	hutang persediaan 2021	350.970.798,95
	Reklas dari Belanja aset berdasarkan BA Rekon Pengadaan Pengurus Barang	100.900.621,00
	Reklas dari beban Jasa	8.683.533.230,00
	Reklas dari beban pemeliharaan Berdasarkan BA Rekon PPK OPD dengan Pengurus Barang	10.846.400,00
3.	Berkurang :	60.334.263.228,01
	persediaan akhir 2021	55.719.277.156,34
	hutang persediaan 2020	376.030.257,00
	reklas ke beban jasa Berdasarkan BA Rekon PPK OPD dengan Pengurus Barang	3.077.305.776,00
	Reklas ke beban pemeliharaan Berdasarkan BA Rekon PPK OPD dengan Pengurus Barang	35.616.350,00
	Reklas ke Aset berdasarkan BA Rekon Pengadaan Pengurus Barang	169.368.250,00
	dropping ke OPD	956.665.438,67
4.	Beban Persediaan-LO 2021 (1 + 2 - 3)	47.210.522.017,44

Dropping persediaan antar OPD merupakan penyaluran persediaan yang diperoleh dari pengadaan barang dan jasa dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat. Beban persediaan pada OPD yang menyalurkan persediaan tidak dicatat sebagai beban persediaan, namun dicatat pada beban persediaan OPD yang menerima persediaan sebesar pemakaian.

4.2.3 Beban Jasa

Beban Jasa adalah beban atas konsumsi jasa selama satu periode pelaporan. Beban jasa tahun 2021 sebesar Rp212.728.808.955,10 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Beban Jasa-LO 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	47.894.999.300,00
2	Dinas Kesehatan	70.799.534.505,10
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.995.046.166,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	12.181.807.408,00
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana	1.628.136.341,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.886.580.498,00

No.	Uraian	Beban Jasa-LO 2021 (Rp)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	633.779.628,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	4.953.643.808,00
9	Dinas Pertanian dan Pangan	2.891.745.238,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	6.871.285.051,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.746.407.252,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.125.313.088,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.982.290.933,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	2.261.331.277,00
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.283.109.222,00
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.821.515.674,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.157.610.366,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.010.583.439,00
19	Sekretariat Daerah	10.610.048.951,00
20	Sekretariat DPRD	5.371.654.645,00
21	Kecamatan Muntok	5.730.966.709,00
22	Kecamatan Simpang Teritip	838.044.900,00
23	Kecamatan Jebus	1.082.325.553,00
24	Kecamatan Kelapa	2.032.500.587,00
25	Kecamatan Tempilang	836.647.900,00
26	Kecamatan Parittiga	1.416.034.298,00
27	Inspektorat Kabupaten	1.035.100.444,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	3.039.674.541,00
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.423.458.850,00
30	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	2.738.587.156,00
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.613.030.034,00
32	Kantor Penanggulangan Bencana dan Kesbangpol	346.078.355,00
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	489.936.838,00
Total		212.728.808.955,10

Perhitungan Beban Jasa Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja jasa mapping- LRA	225.882.966.549,09
2.	Bertambah :	6.794.968.554,40
	Hutang jasa tahun 2021	3.443.336.126,40
	Reklas dari belanja pegawai Berdasarkan SK Mapping	148.700.000,00
	Beban hibah dana keluarga pada Dinas Dikpora	80.065.652,00
	Reklas dari beban Persediaan Berdasarkan BA Rekon PPK OPD dengan Pengurus Barang	3.077.305.776,00
	Reklas dari Belanja aset berdasarkan BA Rekon Pengadaan Pengurus Barang	45.561.000,00
3.	Berkurang :	19.949.126.148,39
	Hutang jasa tahun 2020	5.844.431.981,39
	Reklas kebebasan Persediaan Berdasarkan BA Rekon PPK OPD dengan Pengurus Barang	8.683.533.230,00
	Reklas ke beban pemeliharaan Berdasarkan BA Rekon PPK OPD dengan Pengurus Barang	2.610.574.538,00
	Reklas ke Perjalanan Dinas Berdasarkan BA Rekon PPK OPD dengan Pengurus Barang	217.665.000,00
	Reklas ke Aset berdasarkan BA Rekon Pengadaan Pengurus Barang	2.592.921.399,00
4.	Beban Jasa - LO 2021 (1 + 2 - 3)	212.728.808.955,10

4.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan beban atas pemeliharaan aset dengan tujuan untuk menambah masa manfaat dan menambah nilai aset. Beban pemeliharaan tahun 2021 adalah sebesar Rp11.057.565.375,20 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Beban Pemeliharaan-LO 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2.941.208.801,00
2	Dinas Kesehatan	1.288.608.138,20
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.733.016.495,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	707.262.500,00
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana	16.000.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8.750.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	25.513.450,00
9	Dinas Pertanian dan Pangan	11.200.800,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	344.423.000,00

No.	Uraian	Beban Pemeliharaan- LO 2021 (Rp)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19.477.800,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19.237.500,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.440.000,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	127.085.035,00
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.195.000,00
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	13.101.740,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	31.329.302,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	14.403.000,00
19	Sekretariat Daerah	1.319.417.800,00
20	Sekretariat DPRD	175.915.000,00
21	Kecamatan Muntok	31.738.000,00
22	Kecamatan Simpang Teritip	15.000.000,00
23	Kecamatan Jebus	37.500.000,00
24	Kecamatan Kelapa	40.438.550,00
25	Kecamatan Tempilang	7.905.000,00
26	Kecamatan Parittiga	5.840.000,00
27	Inspektorat Kabupaten	12.500.000,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	13.970.000,00
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	22.320.000,00
30	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	16.390.500,00
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	42.953.964,00
32	Kantor Penanggulangan Bencana dan Kesbangpol	0,00
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.424.000,00
Total		11.057.565.375,20

Perhitungan Beban Pemeliharaan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Pemeliharaan mapping-LRA	8.693.069.634,20
2.	Bertambah :	3.505.357.691,00
	Reklas dari beban Persediaan Berdasarkan BA Rekon PPK OPD dengan Pengurus Barang	29.437.350,00
	Reklas dari beban Jasa Berdasarkan BA Rekon PPK OPD dengan Pengurus Barang	2.610.574.538,00
	Reklas dari belanja persediaan Berdasarkan BA Rekon PPK OPD dengan Pengurus Barang	6.179.000,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Reklas dari Belanja aset berdasarkan BA Rekon Pengadaan Pengurus Barang	859.166.803,00
3.	Berkurang :	1.140.861.950,00
	Reklas ke beban Persediaan Berdasarkan BA Rekon PPK OPD dengan Pengurus Barang	10.846.400,00
	Reklas ke Aset berdasarkan BA Rekon Pengadaan Pengurus Barang	1.130.015.550,00
4.	Beban Pemeliharaan -LO 2021 (1 + 2 - 3)	11.057.565.375,20

4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah beban atas perjalanan dinas pegawai dalam satu periode pelaporan, baik perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah maupun perjalanan dinas luar negeri. Belanja perjalanan dinas tahun 2021 adalah sebesar Rp28.328.893.217,01 dengan rincian per OPD sebagai berikut:

No.	Uraian	Beban Perjalanan Dinas-LO 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	630.997.972,00
2	Dinas Kesehatan	5.105.648.899,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	254.105.159,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	497.803.328,00
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana	186.997.815,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	755.195.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	448.414.500,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	534.277.610,00
9	Dinas Pertanian dan Pangan	440.925.250,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	278.416.680,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	266.591.399,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.586.469.441,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	365.193.172,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	397.416.996,00
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	349.927.897,00
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	375.685.450,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	179.563.299,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	332.391.285,00
19	Sekretariat Daerah	1.682.552.028,01
20	Sekretariat DPRD	8.650.941.062,00
21	Kecamatan Muntok	397.312.113,00
22	Kecamatan Simpang Teritip	109.860.000,00

No.	Uraian	Beban Perjalanan Dinas-LO 2021 (Rp)
23	Kecamatan Jebus	116.379.000,00
24	Kecamatan Kelapa	182.352.230,00
25	Kecamatan Tempilang	126.970.000,00
26	Kecamatan Parittiga	125.450.000,00
27	Inspektorat Kabupaten	2.169.158.721,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	626.617.882,00
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	346.460.966,00
30	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	311.490.038,00
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	388.954.942,00
32	Kantor Penanggulangan Bencana dan Kesbangpol	72.883.083,00
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35.490.000,00
Total		28.328.893.217,01

Perhitungan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Perjalanan Dinas mapping- LRA	28.177.733.972,01
2.	Bertambah :	217.665.000,00
	Reklas dari belanja jasa Berdasarkan BA Rekon PPK OPD dengan Pengurus Barang	217.665.000,00
3.	Berkurang :	66.505.755,00
	Reklas ke belanja aset BA Rekon Pengadaan Pengurus Barang	66.505.755,00
4.	Beban Perjalanan Dinas-LO 2021 (1+2-3)	28.328.893.217,01

4.2.8 Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Tidak terdapat perbedaan nilai antara Belanja Hibah LRA dengan Beban Hibah LO yang disajikan. Beban Hibah tahun 2021 adalah sebesar Rp12.966.036.565,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Beban Hibah-LO 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	6.577.948.800,00
2	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	282.799.207,00
3	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	199.705.000,00

No.	Uraian	Beban Hibah-LO 2021 (Rp)
4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	210.243.000,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.359.309.150,00
6	Sekretariat Daerah	3.531.661.000,00
7	Kantor Penanggulangan Bencana dan Kesbangpol	754.370.408,00
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	50.000.000,00
Total		12.966.036.565,00

4.2.15 Beban Penyusutan Aset Tetap

Beban Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan aset tetap Tahun 2021 adalah sebesar Rp112.092.171.076,00. Beban penyusutan aset tetap akan menambah akumulasi penyusutan. Contoh perhitungan Beban Penyusutan Aset Tetap telah dijelaskan pada CALK Aset Tetap. Nilai Beban penyusutan aset tetap sebesar Rp112.092.171.076,00 diperoleh dari Aplikasi SIMDA BMD dan Kertas Kerja perhitungan Beban dan Akumulasi Penyusutan. Rincian Beban penyusutan aset tetap Tahun 2021 per OPD adalah sebagai berikut:

NO	Uraian	Beban Penyusutan Aset Tetap-LO 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	13.769.501.774,00
2	Dinas Kesehatan	9.983.133.987,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	70.885.959.958,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	4.449.484.976,00
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	466.796.103,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	42.694.158,00
9	Dinas Pertanian dan Pangan	1.567.858.130,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	1.127.691.607,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	342.362.535,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	434.576.658,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	399.515.969,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	824.796.943,00
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	154.299.074,00

NO	Uraian	Beban Penyusutan Aset Tetap- LO 2021 (Rp)
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	851.147.134,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	333.153.704,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	232.953.256,00
19	Sekretariat Daerah	3.188.315.864,00
20	Sekretariat DPRD	587.574.620,00
21	Kecamatan Muntok	562.830.813,00
22	Kecamatan Simpang Teritip	110.309.028,00
23	Kecamatan Jebus	203.069.115,00
24	Kecamatan Kelapa	292.156.025,00
25	Kecamatan Tempilang	98.171.864,00
26	Kecamatan Parittiga	145.932.016,00
27	Inspektorat Kabupaten	83.070.159,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	169.288.964,00
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	200.335.282,00
30	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	159.573.275,00
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	403.646.183,00
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21.971.902,00
	Total	112.092.171.076,00

4.2.16 **Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud**

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud merupakan beban amortisasi atas aset tak berwujud selama satu periode pelaporan. Nilai Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud diperoleh dari Aplikasi SIMDA BMD. Beban amortisasi aset tak berwujud Tahun 2021 adalah sebesar Rp103.755.303,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Beban Amortisasi-LO 2021 (Rp)
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	19.800.000,00
2	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.300.000,00
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12.609.053,00
4	Kecamatan Muntok	16.143.917,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	3.333.333,00
6	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	10.165.000,00
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	38.404.000,00
	Total	103.755.303,00

4.2.17 **Beban Penyusutan Aset Lain-Lain**

Beban penyusutan aset lain-lain merupakan beban penyusutan atas aset lain-lain selama satu periode pelaporan. Nilai Beban Penyusutan Aset Lain-Lain diperoleh dari Aplikasi SIMDA BMD dan Kertas Kerja perhitungan Beban dan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain. Beban Penyusutan Aset Lain-Lain Tahun 2021 adalah sebesar Rp941.881.265,00 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

6. **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan perubahan ekuitas pada periode pelaporan dibandingkan dengan periode pelaporan sebelumnya. Perubahan ekuitas tersebut disebabkan oleh surplus/defisit operasional tahun berjalan dan akibat dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar.

6.1. **Ekuitas Awal**

Ekuitas awal tahun 2021 merupakan ekuitas akhir tahun 2020 yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas awal 2021 adalah sebesar Rp1.376.222.703.254,93.

6.2. **Surplus/Defisit – LO**

Surplus/Defisit–LO merupakan surplus/defisit operasional tahun berjalan yang merupakan selisih antara pendapatan operasional dan beban operasional. Tahun 2021 Surplus/Defisit-LO adalah sebesar Rp32.389.320.123,08.

6.3. **Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar merupakan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar yang mengakibatkan perubahan nilai aset sehingga mempengaruhi nilai ekuitas. Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebesar Rp650.149.065,37 dengan uraian sebagai berikut :

Uraian	Nilai Tahun 2021 (Rp)	Nilai Tahun 2020 (Rp)
Koreksi Ekuitas Lainnya	223.427.368,52	(577.894.806,38)
Penyesuaian Penyisihan Piutang	344.135.190,85	249.036.502,58
Penyesuaian Aset Dibawah Kapitalisasi	(2.771.768.150,00)	(4.680.519.138,00)
Koreksi Nilai	2.854.354.656,00	2.600.294.779,00
Total	650.149.065,37	(2.409.082.662,80)

Koreksi Ekuitas Lainnya tahun 2021 sebesar Rp223.427.368,52 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
- Pembulatan	68,24
- Dropping	(234.431.532,00)
- Penghapusan Aset	(4.771.601.652,00)
- Penghapusan Akumulasi penyusutan aset	5.081.157.117,00
- Dropping akumulasi penyusutan aset	624.864.198,00
- koreksi catat laba/rugi investasi tahun 2020	(53.257.109,00)
- hibah aset	(189.244.957,00)
- Selisih reklas kodefikasi	(299.071.249,00)
- Koreksi Catat Piutang Retribusi Tahun 2020	(15.066.000,01)
- Koreksi lebih saji utang tahun 2020	10.511.256,29
- Reklas Aset dibawah Kapitalisasi menjadi Aset Tetap	69.567.228,00
Total	223.427.368,52

- Pembulatan merupakan pembulatan nilai perolehan aset, baik pembulatan nilai keatas maupun pembulatan nilai kebawah.
- Drooping merupakan mutasi aset antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
- Penghapusan Aset merupakan penghapusan pencatatan aset dari Buku Inventaris.
- Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset merupakan penghapusan pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset dari Neraca.
- Koreksi catat ekuitas/laba dan rugi investasi tahun 2020 merupakan koreksi atas lebih saji Ekuitas Akhir tahun 2020 dan rugi operasional tahun 2021 pada PD. Bangka Barat Sejahtera.
- Hibah aset merupakan hibah atas aset Pemerintah Kabupaten Bangka Barat kepada pihak lain.
- Selisih reklas kodefikasi merupakan perubahan klasifikasi aset tetap berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang berdampak pada perubahan nilai akumulasi penyusutan aset tetap.
- Koreksi Catat Piutang Retribusi Tahun 2020 merupakan koreksi lebih catat piutang retribusi yang terdapat pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian.
- Koreksi lebih saji utang tahun 2020 merupakan koreksi atas lebih saji utang tahun 2020 yang terdapat pada BLUD.
- Reklas Aset dibawah Kapitalisasi menjadi Aset Tetap merupakan Reklas aset dibawah kapitalisasi pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menjadi aset tetap gedung dan bangunan yang disebabkan oleh kapitalisasi dari nilai rehabilitasi gedung dan bangunan.

Penyesuaian penyisihan piutang sebesar Rp344.135.190,85 merupakan pelunasan atas piutang yang telah dilakukan penyisihan dan koreksi catat penyisihan piutang tahun sebelumnya dengan rician sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
- Pelunasan Piutang Pajak	171.599.570,85
- Koreksi catat penyisihan piutang	1.506.600,00
- Pelunasan piutang bagian lancar	171.029.020,00
Total	344.135.190,85

Penyesuaian Aset dibawah kapitalisasi merupakan penyesuaian atas pengadaan tahun berjalan yang nilai pengadaannya dibawah nilai kapitalisasi aset berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan perubahan kodefikasi barang milik daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

Koreksi Nilai tahun 2021 sebesar Rp2.854.354.656,00 merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan nilai aset dan akumulasi penyusutan aset dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
- Koreksi pencatatan aset	3.403.267.160,00
- Koreksi pencatatan akumulasi penyusutan aset	(548.912.504,00)
Total	2.854.354.656,00

6.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 sebesar Rp1.409.262.172.443,38.

Penjelasan Lainnya

Penjelasan Lainnya adalah penjelasan atas kejadian di tahun 2021 maupun hal –hal yang perlu dijelaskan terkait penyusunan laporan keuangan tahun 2021 yaitu :

1. Penyajian Laporan Keuangan

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 11 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih tahun 2021 yang disajikan merupakan laporan konsolidasi

antara Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat dan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Sejiran Setason. Sedangkan Arus Kas Dana BOS dan Arus Kas Dana JKN tidak dikonsolidasi pada Laporan Arus Kas.

2. Terdapat Pekerjaan Pihak Ketiga yang putus kontrak pada tahun 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Pungur Ke Pacing Munang Desa Ranggi Asam Kecamatan Jebus dengan Surat Perjanjian Nomor : 620/02.RJPPMDRA/PPK-ZT/SP/APBD/BB/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dan Surat Perjanjian Perubahan (Contract Change Order) Nomor : 620/02.a RJPPMDRA/PPK-ZT/SP-PP/APBD/BB/XI/2021 tanggal 1 November 2021 yang dilaksanakan oleh CV. Kurau Timur dengan nilai kontrak sebesar Rp431.137.000,00. Pekerjaan fisik tersebut hanya dapat diselesaikan sebesar 66,54% sampai dengan batas waktu penyelesaian pekerjaan, sehingga pembayaran kegiatan tersebut hanya sebesar Rp280.239.050,00 dengan SP2D Nomor 1183/1.3.1.1/LS/2021 tanggal 30 Desember 2021. Terdapat Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan tersebut dengan Nomor : 0003.1680/SPP/III/GP/2021 tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp21.832.413,75 yang telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 25 Februari 2022.
3. Terdapat saldo kas di Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Tempilang sebesar Rp1.412.000,00 yang merupakan gagal transfer atas belanja honorarium pada kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan pada tanggal 21 Desember 2021 dan telah diakui sebagai belanja tahun 2021 namun tidak diakui sebagai kas di bendahara pengeluaran. Retur atas gagal transfer belanja tersebut diterima di kas bendahara pengeluaran pada tanggal 29 Desember 2021 dan pembayaran belanja tersebut dilakukan pada tanggal 6 Januari 2022.
4. Vaksin Covid-19 tahun 2021 yang diterima oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tidak tercatat di dalam persediaan tahun 2021, hal ini dikarenakan Vaksin Covid-19 tersebut tercatat sebagai persediaan pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Daftar vaksin Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia :

No	Nama Obat/ BMHP	Jumlah
1	Vaksin Covid-19 10 DS	7.738,00
2	Covid-19 Vaccine AZ (COVAX)	21,00
3	Vaksin COVAX Astra Zeneca (ITALY)	39,00
4	Vaksin AstaZeneca (Hibah Jepang)	6,00
5	Moderna COVID-19 Vaccine 14 DS	890,00

No	Nama Obat/ BMHP	Jumlah
6	Covid-19 Vaccine AZ 8 DS (UK)	280,00
7	Covid-19 Vaccine AZ (Australia)	30,00
8	ChAdOx1 nCov-19 Vaccine AZD 1222 (AZ Thailand)	2.500,00
9	Vaksin AstaZeneca France (MFC Italy)	530,00
10	Coronavac @ 2 dosis	52.800,00
11	Alcohol Swabs	195.600,00
12	Alcohol Swabs	6.700,00
13	Alcohol Swabs	18.200,00
14	Auto Disposable Syringe (ADS) 0,5 ml	225.060,00
15	Safety Box	397,00
16	Safety Box	1.533,00
17	Vaksin Pfizer @ 6 dosis (Bilateral)	3.510,00
18	Auto Disposable Syringe (ADS) 0,3 ml	22.200,00
19	Re-Constitution Syringe 3 ml	3.828,00
20	Pelarut NaCl	4.290,00
21	Coronavac	14.540,00
22	Alcohol Swabs	5.280,00
23	Auto Disposable Syringe (ADS) 0,5 ml	2.770,00
24	Safety Box	33,00

Berdasarkan Laporan Hasil Pendampingan Pelaksanaan Stock Opname Persediaan Vaksinasi Covid-19 dan Logistik Penunjang Vaksinasi Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Nomor : 700/001/IRDA/2022 Tanggal 11 Januari 2022 yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat, penghitungan fisik persediaan Vaksin Covid-19.

Persediaan Vaksin Covid-19 per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Vaksin	Saldo Menurut SMILE (dosis)	Stock Opname (Jumlah Dosis)			Selisih
			Baik	ED	Rusak	
1	Coronavac @2 dosis isi 40 vial	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00
2	Covid-19 Vaccine Astrazeneca (Thailand)	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
3	Covid-19 Vaccine Moderna	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
4	Pfizer 1 vial @6 dosis (Bilateral)	1.968,00	1.968,00	0,00	0,00	0,00
5	Vaksin Covid-19 @10 Dosis (Coronavac MDV)	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	11.452,00	11.452,00	0,00	0,00	0,00

Persediaan Logistik Penunjang Vaksinasi Covid-19 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Logistik	Saldo Awal milik Dinkes	Jumlah Diterima (Dari Dinkes Provinsi)	Distribusi ke Fasyankes	Stok Dinkes
1	Autodisable Syringe 0,5ml (pcs)	0,0	237.930,00	231.722,00	6.208,00
2	Autodisable Syringe 0,3ml (pcs)	0,0	16.016,00	13.242,00	2.774,00
3	Reconstitution Syringe 3ml	0,0	2.714,00	2.205,00	509,00
4	Pelarut NaCl 10ml	0,0	2.535,00	2.205,00	330,00
5	Alcohol Swab (pcs)	0,0	228.680,00	206.223,00	22.457,00
6	Safety Box (pcs)	0,0	2.013,00	1.766,00	247,00
	Jumlah	0,0	489.888,00	457.363,00	32.525,00